



NASIONAL

FPP TNI Galang Dukungan Makzulkan Gibran, Rencana Kirim Surat ke DPR dan MPR

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.49 WIB



BANDA ACEH - Forum Purnawirawan Perwira TNI atau FPP TNI akan menggalang dukungan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut menjadi pernyataan sikap kelompok purnawirawan terhadap posisi wakil presiden. Rencana aksi sudah mulai dibicarakan secara terbuka. Publik menaruh perhatian pada gerakan

ini. FPP TNI berencana mengirim surat resmi ke sejumlah lembaga negara. Surat tersebut akan ditujukan kepada DPR, MPR, serta pimpinan partai Politik. Melalui surat itu, mereka ingin menyampaikan desakan terkait proses pemakzulan. Jalur formal menjadi pilihan yang akan ditempuh.

Perwakilan FPP TNI, Dwi Cahyo, menjelaskan dasar langkah

yang akan diambil. Ia menyatakan bahwa gerakan tersebut berlandaskan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Landasan konstitusional menjadi argumen utama yang digunakan. Dengan merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, FPP TNI ingin menegaskan bahwa langkah

mereka berada dalam koridor hukum. Pemakzulan bukanlah proses yang dapat dilakukan secara sepihak. Dukungan dari lembaga legislatif dan partai politik menjadi kunci. Penggalangan dukungan dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

TEKNOLOGI

7 Rekomendasi Kamera untuk Pemula yang Mau Jadi Content Creator



Jakarta, 9 Oktober 2026. Kamera pertama sering jadi keputusan yang tertunda berbulan-bulan. Bukan karena harganya, tapi karena bingung mana yang tidak bikin menyerah di minggu pertama.

Kekawatirannya masuk akal. Kamera yang menuntut pemakainya memahami belasan pengaturan sebelum bisa merekam hal sederhana cenderung berakhir di lemari.

[Selengkapnya di halaman 18 »](#)

NASIONAL

Jokowi Mulai Tak Tegas soal Gibran Dampingi Prabowo 2029, Ada Apa?



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum kembali menegaskan dukungannya terhadap duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Saat ditanya mengenai kemungkinan putranya

kembali menjadi pendamping Prabowo, Jokowi justru mengingatkan bahwa kontestasi Politik tersebut masih jauh.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
Aneka Berita	18

LIFESTYLE

Warung Kopi Pangku Muncul di PIK, Makan Mi Instan Saja Sampai Dipangku Cewek



BANDA ACEH - Warung kopi pangku di PIK viral di media sosial. Pengunjung terlihat makan mi instan sambil dipangku wanita, bikin warganet penasaran.

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) mendadak menjadi sorotan

setelah video yang memperlihatkan aktivitas sebuah warung kopi pangku viral di media sosial.

[Selengkapnya di halaman 18 »](#)

NASIONAL

Mabes TNI Tahan Letkol Inf Arman, Dugaan Markas Judi Online di Rumah Dinas Cijantung



BANDA ACEH - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Kom-

pleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online (judol).

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

OPINI

Gibran: Ujian Legitimasi dan Stabilitas Politik



Oleh: Safriady ((Penulis adalah Pemerhati Isu Politik))

ESAKAN agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kini memasuki babak baru.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026

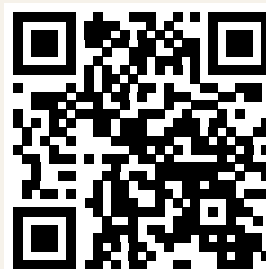
terkait perkara syarat pendidikan Gibran, sejumlah suara publik, akademisi, politikus, dan pihak yang menjadi pemohon perkara tersebut menyerukan agar Gibran mempertimbangkan ...

[Selengkapnya di halaman 19 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

36 BERITA

NASIONAL

FPP TNI Galang Dukungan Makzulkan Gibran, Rencana Kirim Surat ke DPR dan MPR

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.49 WIB



BANDA ACEH - Forum Purnawirawan Perwira TNI atau FPP TNI akan menggalang dukungan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut menjadi pernyataan sikap kelompok purnawirawan terhadap posisi wakil presiden. Rencana aksi sudah mulai dibicarakan secara terbuka. Publik menaruh perhatian pada gerakan ini. FPP TNI berencana mengirim surat resmi ke sejumlah lembaga negara. Surat tersebut akan ditujukan kepada DPR, MPR, serta pimpinan partai Politik. Melalui surat itu, mereka ingin menyampaikan desakan terkait proses pemakzulan. Jalur formal menjadi pilihan yang akan ditempuh.

Perwakilan FPP TNI, Dwi Cahyo, menjelaskan dasar langkah yang akan diambil. Ia menyatakan bahwa gerakan tersebut berlandaskan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Landasan konstitusional men-

jadi argumen utama yang digunakan. Dengan merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, FPP TNI ingin menegaskan bahwa langkah mereka berada dalam koridor hukum. Pemakzulan bukanlah proses yang dapat dilakukan secara sepihak. Dukungan dari lembaga legislatif dan partai politik menjadi kunci. Penggalangan dukungan dilakukan untuk memenuhi persyaratan formal.

Rencana pengiriman surat ke DPR dan MPR menunjukkan orientasi pada jalur institusional. Kedua lembaga tersebut memiliki peran dalam proses pemakzulan sesuai konstitusi. Pimpinan partai politik juga menjadi sasaran karena pengaruh mereka di parlemen. Strategi ini dirancang agar desakan memiliki bobot politik. Dwi Cahyo sebagai perwakilan FPP TNI menyampaikan sikap kelompoknya secara terbuka. Forum yang terdiri dari purnawirawan tersebut ingin menyuarakan pandangan. Mereka menilai ada dasar untuk mendo-

rong proses pemakzulan. Pasal 7A UUD 1945 menjadi rujukan yang terus digaungkan.

Penggalangan dukungan masih dalam tahap awal. FPP TNI akan menyebarkan aspirasi kepada berbagai pihak. Surat resmi menjadi instrumen utama yang akan digunakan. Isi surat dipastikan akan memuat argumen berdasarkan ketentuan konstitusi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi objek dari desakan tersebut. FPP TNI memilih jalur pemakzulan sebagai bentuk sikap politik. Langkah ini dipastikan akan menimbulkan perdebatan di ruang publik. Pro dan kontra terhadap wacana pemakzulan diperkirakan akan muncul. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Proses tersebut harus melalui usulan DPR dengan syarat-syarat tertentu. FPP TNI berupaya mendorong agar mekanisme tersebut dijalankan. Duku-

ngan politik menjadi syarat mutlak.

Dengan melibatkan pimpinan partai politik, FPP TNI ingin memperluas basis dukungan. Partai-partai di parlemen memiliki peran menentukan dalam proses di DPR. Tanpa dukungan fraksi, usulan pemakzulan sulit berlanjut. Oleh karena itu, surat kepada pimpinan partai menjadi bagian penting dari strategi. Dwi Cahyo menekankan bahwa langkah FPP TNI bukan tanpa dasar. Landasan konstitusional menjadi legitimasi yang terus digarisbawahi. Forum purnawirawan ingin tetap berada dalam koridor hukum negara. Pendekatan formal dipilih ketimbang aksi di luar sistem.

Rencana pengiriman surat ke DPR, MPR, dan pimpinan partai politik akan menjadi ujian awal. Seberapa besar respons yang diterima akan menentukan kelanjutan gerakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Mabes TNI Tahan Letkol Inf Arman, Dugaan Markas Judi Online di Rumah Dinas Cijantung

Oleh Redaksi · 9 Okt, 18.45 WIB



BANDA ACEH - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online (judol).

Penahanan tersebut menambah sorotan terhadap kasus dugaan praktik perjudian daring yang terungkap di lingkungan perumahan militer. Pasalnya, lokasi yang seharusnya digunakan sebagai tempat tinggal justru diduga menjadi pusat aktivitas ilegal yang melibatkan sejumlah warga sipil.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan bahwa Letkol Inf Arman telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya), Jumat (9/10/2026). "Terduga sudah ditahan," kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan Letkol Inf Arman serta mengungkap bagaimana rumah dinas di kawasan KPAD Cijantung dapat digunakan untuk aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian online.

Meski demikian, dugaan keterlibatan yang bersangkutan masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.

11 Orang Diamankan, Puluhan Perangkat Elektronik Disita

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah aparat mengamankan 11 orang yang diduga berperan sebagai operator judi online di rumah dinas kawasan KPAD Cijantung.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengungkapkan, 11 orang tersebut terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Seluruhnya merupakan warga sipil yang diduga terlibat dalam operasional aktivitas tersebut.

Dari lokasi, petugas menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler,

serta sembilan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi tersebut pada Minggu (4/10/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas kemudian mengamankan lokasi dan membawa 11 orang yang ditemukan di tempat tersebut ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan.

Lokasi kejadian juga dipasang garis polisi, sedangkan aliran listrik dipadamkan guna mendukung pengamanan dan proses pemeriksaan.

Banyaknya perangkat elektronik yang ditemukan menjadi salah satu aspek penting yang perlu didalami penyidik untuk mengungkap pola operasional aktivitas tersebut, termasuk fungsi setiap perangkat dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Rumah Dinas Militer Diduga Disalahgunakan

Kasus ini menjadi perhatian karena lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian daring merupakan rumah dinas di lingkungan perumahan militer.

Penggunaan fasilitas yang berada di lingkungan institusi negara untuk kegiatan yang diduga melanggar hukum memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, pengamanan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan rumah dinas tersebut.

Penyidik perlu menelusuri bagaimana aktivitas itu dapat berlangsung, siapa yang mengendalikan operasionalnya, serta apakah terdapat pihak lain yang diduga memberikan bantuan atau fasilitas.

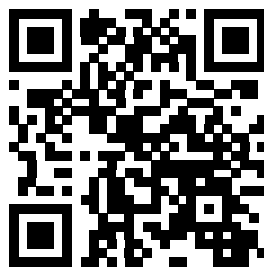
Pemeriksaan terhadap Letkol Inf Arman juga menjadi bagian penting untuk mengurai hubungan antara penguasaan atau penggunaan rumah dinas dengan aktivitas yang ditemukan di lokasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

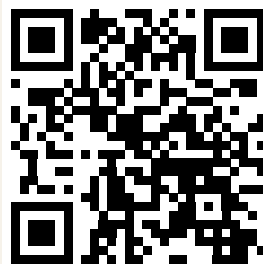
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jokowi Mulai Tak Tegas soal Gibran Dampingi Prabowo 2029, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 9 Okt, 20.04 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum kembali menegaskan dukungannya terhadap duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Saat ditanya mengenai kemungkinan putranya kembali menjadi pendamping Prabowo, Jokowi justru mengingatkan bahwa kontestasi Politik tersebut masih jauh.

"Ya pemilu kan masih jauh," kata Jokowi, dikutip Jumat (9/10/2026).

Pernyataan itu berbeda dari sikap Jokowi sebelumnya yang secara terbuka mendorong Prabowo dan Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode. Kali ini, ia memilih menekankan bahwa masih ada waktu panjang sebelum pemilihan presiden berikutnya berlangsung.

Jokowi juga meminta Gibran memprioritaskan tugasnya sebagai wakil presiden daripada terlalu jauh membicarakan kontestasi politik mendatang. Menurutnya, pekerjaan pemerintahan dan pela-

nyanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama saat ini.

"Kerja dulu. Ya kerja politik, kerja pemerintahan, kerja untuk rakyat. 2029 itu masih jauh," tegas Jokowi.

Sikap tersebut menjadi perhatian karena Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan dukungan secara eksplisit terhadap pasangan Prabowo-Gibran untuk dua periode. Pada 5 Februari 2026, ia bahkan kembali menegaskan keinginannya agar duet tersebut melanjutkan kepemimpinan.

"Saya sudah sampaikan, Prabowo-Gibran itu dua periode. Itu saja sudah," kata Jokowi pada Kamis (5/2/2026).

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Jokowi pada September 2025. Ketika itu, ia mengaku telah meminta para relawannya mendukung Prabowo dan Gibran untuk kembali berpasangan pada pemilihan presiden berikutnya.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk hal itu (mendukung Prabowo-

Gibran dua periode)," kata Jokowi pada Jumat (19/9/2025).

Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan penekanan dalam jawaban Jokowi mengenai Pilpres 2029. Jika sebelumnya ia secara terbuka menyebutkan dukungan untuk dua periode, kali ini ia tidak memberikan penegasan serupa dan memilih mengingatkan bahwa pemilu masih lama.

Pertanyaan mengenai masa depan duet Prabowo-Gibran itu muncul bersamaan dengan sorotan terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran. Isu tersebut kembali menjadi perbincangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung tidak ditemukannya bukti ijazah SLTA atau sederajat milik Gibran dalam konteks perkara yang diperiksa.

Menanggapi putusan tersebut, Jokowi mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa jalur pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan tahapan

pendidikan yang berlaku di Indonesia.

"Kita hormati putusan MK. Di tiap negara punya sistem pendidikan berbeda. Kalau di Indonesia ada SMA, diploma, dan S1. Di luar juga punya sistem sendiri," jelas Jokowi.

Jokowi juga menekankan bahwa Gibran sebaiknya tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dan melayani masyarakat. Ia tidak memberikan kepastian baru mengenai apakah putranya akan kembali maju bersama Prabowo pada Pilpres 2029.

Pernyataan terbaru Jokowi belum dapat dimaknai sebagai pencabutan dukungan terhadap duet Prabowo-Gibran. Namun, dibandingkan dengan pernyataannya pada 2025 dan Februari 2026, jawaban kali ini tidak lagi secara eksplisit menegaskan pasangan tersebut untuk dua periode.

NASIONAL

Yusril Enggan Komentari Putusan MK soal Ijazah Gibran, Sebut Wapres Sebagai Atasannya

Oleh Redaksi · 9 Okt, 20.03 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memilih tidak memberikan komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Yusril berkata meskipun memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum tata negara, ia merasa tidak berada dalam posisi yang tepat untuk mengomentari putusan MK yang berkaitan dengan Gibran.

yang hendak ditempuh sejumlah anggota DPR tersebut bukan perkara yang akan dikomentarnya sebagai menteri.

"Para anggota DPR yang mau mengambil langkah pemakzulan, itu kami tidak bisa berkomentar apa-apa, ya. Jadi kami patuh arahan presiden apa yang kami harus lakukan," jelasnya.

Gibran Klaim Lulus SMA sehingga Bisa Kuliah S1

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pun sudah angkat bicara mengenai putusan MK yang menyinggung persoalan ijazah pendidikan menengah atas yang dimilikinya. Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.

"Saya sendiri walaupun selama ini belajar hukum tata negara, tetapi saya merasa tidak pada posisi berkomentar pada persoalan ini," kata Yusril di Jakarta, Jumat (9/10).

Ia menjelaskan hubungan kerja dalam pemerintahan menjadi salah satu pertimbangannya untuk tidak memberikan pandangan terhadap persoalan tersebut. Menurut Yusril, presiden dan wakil presiden merupakan atasan bagi para menteri yang berada dalam kabinet.

"Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu atasan kami," ucapnya.

Alih-alih memberikan penilaian, Yusril memilih menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Ia menyebut MK maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memproses perkara terkait sebagai pihak yang perlu menjadi rujukan.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," ucap Gibran di Jakarta, Rabu (7/10).

Dalam putusannya, MK menyatakan Gibran tidak terbukti memiliki ijazah yang setara dengan jenjang SMA dalam sistem pendidikan Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam perkara yang berkaitan dengan keabsahan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

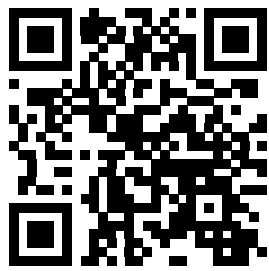
Meski demikian, Gibran menghormati keputusan MK tersebut. Ia pun menyatakan, tidak akan mengubah fokusnya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," pungkas Gibran

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

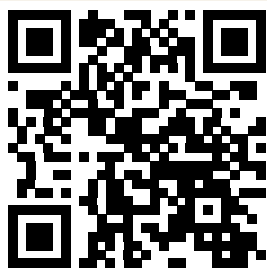
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bau Busuk dari Gedung SPPG Kendal Bikin Geger, Warga Tak Menyangka Ada Mayat Terborgol

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.55 WIB



BANDA ACEH – Bau busuk dari gedung SPPG di Kendal bikin geger warga. Tak disangka, jasad perempuan ditemukan terborgol di teralis jendela dengan luka fatal di kepala.

Bau busuk yang tercium dari sebuah gedung kosong di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berujung pada penemuan jasad perempuan dalam kondisi mengenaskan.

Korban bernama Donna Azulul Aditya ditemukan meninggal dunia dengan borgol yang masih terpasang di teralis jendela bangunan yang disewa oleh Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Informasinya kemudian ramai beredar di media sosial pada Jumat, 9 Oktober 2026, dan mengundang perhatian publik.

Awalnya, keberadaan jasad Donna terungkap setelah muncul aroma tidak sedap dari bangunan tersebut.

Bau busuk yang tercium di sekitar lokasi menjadi petunjuk awal hingga akhirnya ditemukan jasad

perempuan yang sudah tak bernyawa.

Kondisi korban saat ditemukan sontak menjadi sorotan.

Donna dilaporkan berada di dekat teralis jendela dengan borgol masih terpasang.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

Informasi mengenai penemuan jasad ini salah satunya dibagikan melalui akun X @serabutannn pada 9 Oktober 2026.

Kasus tersebut juga diberitakan Kilat.com dengan mengutip informasi mengenai penemuan mayat terborgol di gedung SPPG.

Donna diketahui berasal dari Kampung Karangsari, Kendal.

Sementara itu, bangunan tempat jasadnya ditemukan merupakan gedung kosong yang disewa oleh Yayasan SPPG.

Bukan cuma kondisi korban yang ditemukan dengan borgol,

penyebab kematiannya juga menjadi perhatian.

Berdasarkan informasi yang diberitakan, hasil autopsi menunjukkan bahwa Donna meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa.

Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci benda yang digunakan, waktu terjadinya kekerasan, maupun bagaimana rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan.

Kondisi Donna saat ditemukan juga belum cukup untuk menjelaskan siapa yang memasang borgol atau apa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Sejumlah pertanyaan pun masih membutuhkan jawaban.

Bagaimana korban bisa berada di gedung kosong itu? Apakah ada orang yang terakhir kali bertemu dengannya? Lalu, sejak kapan

korban berada di lokasi sebelum jasadnya ditemukan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan hasil penyelidikan lebih lanjut.

Tanpa keterangan resmi yang lengkap, dugaan mengenai pelaku maupun motif kejadian belum bisa dipastikan.

Lokasi penemuan jasad Donna turut menarik perhatian karena berada di bangunan yang disewa oleh Yayasan SPPG.

Meski begitu, fakta mengenai lokasi penemuan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan yayasan dalam peristiwa kematian tersebut. Hubungan korban dengan bangunan itu, aktivitas yang berlangsung di lokasi, serta pihak-pihak yang terakhir berada di sana masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Kasus ini juga menjadi perbincangan warganet setelah informasi penemuan mayat terborgol beredar luas di media sosial.

NASIONAL

Kepala Bakom Sarankan Anies Terima Jika Prabowo Tawari Posisi Menteri

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.47 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Politik senior yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak ragu jika mendapat tawaran bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Syahganda, Anies layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Menteri Pendidikan. Ia menilai kepentingan bangsa untuk mendapatkan figur yang memiliki kapasitas seharusnya ditempatkan di atas ego dan gengsi politik dari persaingan Pilpres sebelumnya.

"Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok," ujar Syahganda dalam sinar Total Politik yang tayang Rabu (23/9/2026). Ketika menyampaikan hal ini, Syahganda belum dilantik oleh Prabowo sebagai Kepala Bakom RI.

Syahganda mengatakan langkah rekonsiliasi politik juga pernah dilakukan Prabowo. Pada 2019, Prabowo yang sebelumnya menjadi rival politik Joko Widodo bersedia bergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Menurut dia, sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi Anies untuk mengedepankan kepentingan nasional hingga menghadapi agenda politik berikutnya pada 2029.

Syahganda juga menyinggung kemungkinan adanya ego atau gengsi politik jika Anies menerima tawaran dari Prabowo. Ia menilai hal tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang.

"Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi. Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga," tegasnya.

Menurut Syahganda, hubungan politik kedua tokoh tersebut memiliki sejarah tersendiri. Ia

mengingatn bahwa Prabowo pernah memiliki peran dalam mengusung Anies dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Syahganda juga menilai Prabowo memiliki kecenderungan merangkul berbagai kelompok dan tokoh dengan latar belakang politik yang berbeda.

Ia mencontohkan Wiranto yang menurutnya pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari institusi militer pada 1998, tetapi kemudian justru mendapat peran dalam pemerintahan sebagai Penasihat Presiden.

Tidak hanya Anies, Syahganda juga menyebut sejumlah tokoh di luar koalisi pemerintahan yang dimilainya dapat dipertimbangkan untuk masuk ke kabinet.

Nama Mahfud MD dan Ganjar Pranowo disebut sebagai dua figur yang menurut Syahganda memiliki kapasitas kepemimpinan dan dapat dilibatkan dalam pemerintahan.

Ia mengkritik pola pikir the winner takes all atau anggapan bahwa hanya pihak yang memenangkan kontestasi yang berhak mendapatkan ruang dalam pemerintahan.

"Jangan selalu bicara the winner takes all, merasa paling berkeriingat lalu yang lain tidak. Kalau mengandalkan itu saja, stok sumber daya manusia untuk membantu Prabowo akan kurang, mengingat jumlah struktur kabinet saat ini sangat besar dengan lebih dari 100 menteri dan wakil menteri," urai Syahganda.

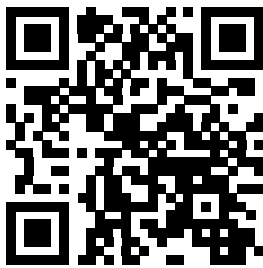
Menurutnya, pelibatan figur profesional maupun tokoh di luar koalisi dominan dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas sumber daya manusia yang tersedia bagi pemerintahan.

Syahganda berharap keterlibatan tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kebijakan pemerintahan ke depan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

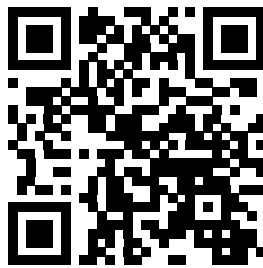
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung: Publik Merasa Ini Saatnya Hukuman Maksimal bagi Dinasti Jokowi

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.58 WIB



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung memperingatkan potensi meningkatnya kemarahan masyarakat setelah putusan terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai polemik tersebut dapat memperbesar akumulasi kekecewaan publik yang sebelumnya muncul dalam persoalan ijazah dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky bahkan menyebut ada kemungkinan masyarakat memandang situasi saat ini sebagai momentum untuk menuntut hukuman Politik maksimal terhadap dinasti dari Jokowi.

“Kalau dibayangkan pikiran saya, saya anggap sudah terjadi. Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR. Jadi, masalah politik. Kita mesti cegah, jangan

sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah (Pak Jokowi dan Pak Gibran), akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal bagi dinasti Jokowi,” ungkap Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, keresahan yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat berkumpul menjadi tekanan politik yang lebih besar.

Rocky menilai pengadilan baru-baru ini juga seolah-olah mengalihkan persoalan kepada DPR. Ia memandang langkah tersebut berpotensi menjadikan parlemen sebagai arena baru bagi perdebatan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimerang. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan

untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky.

Bagi Rocky, perubahan arena pembahasan tersebut perlu dicermati karena persoalan yang masuk ke wilayah politik berpotensi melibatkan lebih banyak kepentingan. Ia mengingatkan bahwa reaksi masyarakat tidak cukup dipahami hanya melalui proses hukum, tetapi juga melalui perkembangan opini dan kepercayaan publik.

Meski demikian, penilaian Rocky bahwa MK seolah-olah menyerahkan persoalan kepada DPR merupakan interpretasinya atas putusan tersebut. Makna dan konsekuensi hukum putusan tetap perlu merujuk pada amar serta pertimbangan resmi MK.

Rocky juga menyinggung fenomena pencopotan foto dari Wapres Gibran. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai salah satu

indikasi dampak politik yang menurutnya perlu diperhatikan setelah putusan MK.

“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunkin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.

Ia juga mengemukakan penilaiannya mengenai dugaan publik terkait dokumen pendidikan Gibran. Rocky mengatakan masyarakat merasa dugaan bahwa Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti.

“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” tuturnya.

NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Sederet Pasal Berlapis untuk Penjarakan KPU RI

Oleh Redaksi · 9 Okt, 20.09 WIB



BANDA ACEH -Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menjelaskan pasal berlapis yang terancam bisa menyeret sejumlah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke penjara karena perkara ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (RI) yang tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sudah masuk ke ranah etika dalam hukum tata negara.

Sebab kata Mahfud MD, akan berbahaya ke depannya apabila MK mengeluarkan keputusan disqualifikasi seorang Presiden atau Wakil Presiden sementara prosesnya sudah berjalan.

Oleh karenanya, Mahfud MD menyebut keputusan MK yang tidak mendiskualifikasi Gibran sudah tepat.

Terlebih MK menjelaskan dalam keputusannya bahwa Gibran telah melanggar persyaratan Pilpres 2024 sejak awal.

Di mana Gibran bukan melampirkan ijazah SMA melainkan surat keterangan absensi dari sekolahnya di Singapura.

Artinya kata Mahfud, putusan MK 6 Oktober 2026 lalu sudah jelas, bahwa Mahkamah membuka peluang untuk semua pihak yang terlibat agar dikenakan pidana.

Pidana tersebut bisa karena kelalaian atau pun kesengajaan proses administrasi Pilpres 2024.

Bahkan kata Mahfud, pihak KPU RI yang bertanggung jawab saat Pilpres 2024 bisa terkena pasal berlapis.

Pasal berlapis itu mulai dari Undang-undang Informasi Tekno-

logi Informatika (UU ITE), kebebasan publik, dan pemalsuan surat.

Pun pihak KPU RI yang meloloskan Gibran juga bisa terkena pidana Undang-undang Pemilu.

“Undang-undang Pemilu sendiri berlapis tuh pidananya,” jelas Mahfud dalam acara Rossi Kompas Tv pada Jumat (9/10/2026).

Selain KPU RI, menurut Mahfud MD, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang saat itu masih berbentuk Dirjen juga bisa terkena pidana karena mengeluarkan surat rekomendasi untuk KPU RI agar Gibran bisa memakai surat keterangan absen untuk mendaftar Pilpres 2024 bukan sertifikat ijazah.

Sebelumnya MK menggelar sidang putusan terkait permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan.

Gugatan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menerima gugatan tersebut.

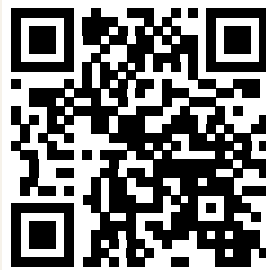
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menerangkan bahwa mereka tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal itu lantaran yang diserahkan Gibran bukan ijazah SMA saat bersekolah di Singapura melainkan setara dengan surat keterangan absen

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gibran Tak Segera Dilengserkan, Muslim Arbi Peringatkan Ancaman Instabilitas Politik

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH — Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak kunjung menemukan penyelesaian dinilai berpotensi memicu ketegangan Politik dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi mengingatkan, aspirasi masyarakat yang tidak mendapat respons memadai dapat berkembang menjadi gelombang demonstrasi.

Muslim menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak boleh mengabaikan suara masyarakat yang menghendaki persoalan terkait kedudukan Gibran disikapi secara serius.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab politik untuk mendengarkan aspirasi publik dan menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku.

“DPR harus mendengar suara rakyat,” kata Muslim Arbi kepada Monitorindonesia.com, Jumat (9/10/2026).

Ia mengingatkan, persoalan politik yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan berpotensi memperlebar ketegangan di tengah masyarakat. Apalagi, ketika aspirasi publik tidak memperoleh

tanggapan yang dianggap memadai dari lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Muslim, situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena ketidakpuasan masyarakat dapat disalurkan melalui demonstrasi.

“Jika eskalasi tidak dikelola dengan baik, kondisi itu berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan memperuncing ketidakstabilan politik,” tegasnya.

Muslim menilai, DPR harus menunjukkan respons terhadap perkembangan aspirasi masyarakat.

Lembaga legislatif, menurut dia, tidak cukup hanya menyaksikan polemik yang berkembang, tetapi perlu menjalankan fungsi konstitusionalnya sesuai ketentuan hukum.

Pemberhentian Wapres Harus Melalui Mekanisme Konstitusi

Meski demikian, persoalan pemberhentian wakil presiden tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan desakan politik atau demonstrasi.

Proses tersebut harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden

dan/atau wakil presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan tahapan serta persyaratan yang telah ditentukan.

DPR dapat menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi.

“Pendapat tersebut harus melalui proses pemeriksaan di MK sebelum pemberhentian dapat diputuskan dalam forum MPR sesuai mekanisme yang berlaku,” paparnya.

Dengan demikian, tuntutan politik terkait posisi Gibran harus dibedakan dari proses hukum dan konstitusional yang menjadi dasar pemberhentian seorang wakil presiden.

Namun, Muslim mengingatkan bahwa keberadaan mekanisme konstitusional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, DPR tetap memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara publik dan menyikapi persoalan tersebut secara serius.

Jangan Biarkan Polemik Memperlebar Ketegangan

Muslim menilai, respons lembaga negara terhadap aspirasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

“Ketika persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak memperoleh penjelasan dan penanganan yang memadai, ruang ketidakpuasan berpotensi semakin melebar,” jelasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui jalur hukum dan konstitusi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Polemik mengenai Gibran, menurut pandangan Muslim, tidak semata-mata berkaitan dengan kedudukan seorang pejabat negara.

Persoalan tersebut juga menyangkut tanggung jawab lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusional serta menjaga kepercayaan masyarakat.

DPR, dalam konteks ini, dituntut mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Mantan Guru Gibran Sakit Hati, ‘Nggak mungkin sekelas Pak Jokowi putranya tidak lulus SMA’

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.31 WIB



BANDA ACEH - Rohwati, mantan guru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta, mengaku sakit hati mendengar anggapan bahwa mantan muridnya itu tidak lulus SMA.

Ia mengenang Gibran sebagai siswa yang memiliki kemampuan akademik baik dan bersikap sopan kepada guru.

Pernyataan Rohwati muncul ketika polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan pada 6 Oktober 2026.

“Kalau saya agak sakit hati. Nggak mungkin terjadi. Sekelas Pak Jokowi putranya tidak lulus SMA saya tidak mungkin. Terutama saya sebagai gurunya saya termasuk yang tidak terima. Bukan anak bodoh anak titipan. Dan memang keterima murni semua,” ujar Rohwati, dikutip Jumat (9/10/2026).

Rohwati mengajar Gibran pada periode 1999–2002. Ia menegaskan, menurut pengalamannya, Gibran diterima di SMPN 1 Surakarta melalui proses akademik, bukan karena status ayahnya, Joko Widodo, yang kemudian menjadi Presiden ke-7 RI.

Namun, kesaksian tersebut menggambarkan pengalaman Rohwati ketika mengajar Gibran di tingkat SMP. Keterangan itu tidak secara langsung menjelaskan status kelulusan Gibran dari SMA atau dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan dalam perkara di MK.

Rohwati Kenang Kemampuan Bahasa Inggris Gibran

Selain persoalan penerimaan di sekolah, Rohwati mengingat kemampuan Bahasa Inggris Gibran yang dinilainya cukup baik.

Menurut dia, kemampuan tersebut membuat keputusan Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura terasa wajar.

“Saya sering mencocokkan dengan Bahasa Inggris termasuk bagus. Makanya ke luar negeri. Wajar banget kalau sekolah di Singapura,” katanya.

Rohwati juga menilai Gibran memiliki kemampuan Bahasa Jawa yang baik.

“Bagus. Mas Gibran termasuk Bahasa Jawanya juga bagus. Biasanya anak-anak yang Bahasa Jawanya bagus Bahasa Inggrisnya juga bagus,” ujarnya.

Kesaksian itu memperlihatkan penilaian pribadi Rohwati terhadap kemampuan bahasa mantan muridnya. Namun, kemampuan akademik yang diamati saat SMP tidak dapat dijadikan bukti langsung mengenai penyelesaian pendidikan pada jenjang berikutnya.

Mantan Guru Sebut Gibran Tetap Sopan kepada Guru

Rohwati juga mengenang Gibran sebagai siswa yang menjaga sopan santun terhadap guru. Menurut dia, sikap tersebut tetap terlihat setelah Gibran memasuki dunia Politik dan menjabat Wali Kota Solo.

“Kebetulan Pak Jokowi anaknya mengikuti adat. Yang saya tahu sopan banget. Terutama kalau sama guru,” kata Rohwati.

Ia mengatakan Gibran masih menunjukkan sikap hormat ketika bertemu guru-gurunya setelah menjadi wali kota.

“Bahkan sudah jadi Wali Kota saya masih guru ketika tahu cium tangan kalau ketemu gurunya. Dari SMP itu kesan sangat menonjol,” ujarnya.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari kenangan Rohwati tentang karakter Gibran. Meski demikian, persoalan yang diperdebatkan dalam perkara di MK berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan dokumen pendukungnya, bukan perilaku Gibran ketika masih bersekolah.

Apa Sebenarnya Temuan MK soal Pendidikan Gibran?

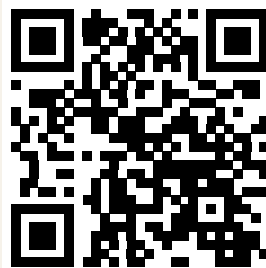
Mahkamah Konstitusi pada Selasa (6/10/2026) menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

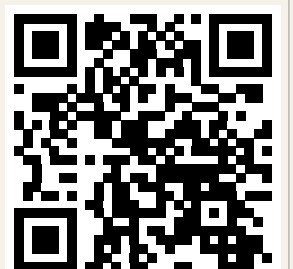
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

5 Parpol Respons Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Pemakzulan hingga Pansus

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.15 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah partai Politik (parpol) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Meski tidak menerima permohonan tersebut, MK tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen tanda kelulusan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani, Selasa (6/10/2026).

Sejumlah parpol kemudian menyampaikan sikap dan panda-

ngan masing-masing terkait tindak lanjut putusan tersebut, mulai dari imbauan menghentikan polemik hingga usulan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR.

1. Gerindra Imbau Polemik Ijazah Gibran Dihentikan

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menghormati putusan MK yang tidak menerima permohonan PHPU terkait ijazah Gibran. Dia meminta seluruh pihak menyikapi putusan tersebut secara bijak dan menghentikan polemik yang berkepanjangan.

"Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak, menghentikan polemik yang berlarut-larut, serta bersatu mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah demi menghadapi tantangan ekonomi global dan pembangunan nasional," kata Sugiat saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menilai spekulasi dan wacana hukum mengenai posisi Gibran berpotensi menimbulkan ketidak-

pastian hukum. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik Indonesia.

"Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," kata Sugiat.

2. Legislator PDIP Nilai Gibran Berpotensi Dimakzulkan

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai Gibran berpotensi dimakzulkan sebagai Wakil Presiden. Dia mendasarkan pandangannya pada pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen kelulusan Gibran yang setara dengan SMA.

"Menurut saya yang paling penting dari Putusan itu adalah fakta bahwa MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran punya ijazah SMA atau yang setara. Itu berarti

dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden," kata Deddy saat dihubungi iNews.id, Rabu (7/10/2026).

Deddy menduga dokumen yang diajukan Gibran untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan bermasalah secara hukum. Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi dasar proses pemakzulan.

"Karena dia sudah terpilih tetapi dengan melanggar syarat yang ditetapkan oleh UU, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan atau melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam UUD RI pasal 7A dan 7B," ujar Deddy.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Dicopot sebagai Menkeu, Syahganda Ungkap Jabatan yang Berpotensi Diberi Prabowo ke Purbaya

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Politik senior yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan jabatan yang berpotensi diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Purbaya Yudhi Sadewa setelah dicopot dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu).

Syahganda menilai peluang Purbaya untuk kembali menduduki jabatan strategis di pemerintahan Prabowo masih cukup terbuka. Menurutnya, selama memimpin Kementerian Keuangan pada periode 8 September 2025 hingga 14 September 2026, Purbaya tidak menerima penilaian negatif dari Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda dalam siniar Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat (18/9/2026), sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom RI.

"Pak Probowo tidak memberikan penilaian negatif sama Pak Purbaya. Jadi saya pikir bisa aja gitu loh, bisa aja dipanggil kembali," ujarnya, dikutip Jumat (9/10).

Syahganda menilai salah satu posisi yang berpotensi ditempati Purbaya adalah Bank Indonesia. Menurutnya, Purbaya memiliki pemahaman yang kuat mengenai sektor perbankan dan berbagai tantangan yang akan dihadapi industri keuangan ke depan.

"Kalau Pak Purbaya menurut saya satu lagi yang dia hafal betul itu kan Bank Indonesia jadi guber-

nur bank sentral, kan sekarang si ini. Tapi kan kita harus melihat juga bahwa problematika perbankan kita ini kan banyak ke depan ini ya kan karena banyak bank-bank ini masih tambal sulam kan," KATANYA.

Ia menjelaskan bahwa selama memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya telah mengidentifikasi berbagai persoalan di sektor perbankan, termasuk kondisi sejumlah bank dan lembaga keuangan yang dinilai memerlukan perhatian khusus.

"Jadi selama Pak Purbaya di LPS, lembaga Penjaminan Simpanan, dia sudah mengidentifikasi mana bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang sudah sepatasnya sebenarnya tutup atau apa itu Pak Purbaya sudah tahu itu," jelasnya.

Karena itu, Syahganda menilai apabila Purbaya ditempatkan di bank sentral, maka ia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan berbagai agenda yang pernah dikerjakannya saat memimpin LPS.

"Nah, kalau dia dimasukkan ke bank sentral tentu dia senang pastinya gitu karena dia bisa melanjutkan kerja-kerja dia di LPS dulu," tuturnya.

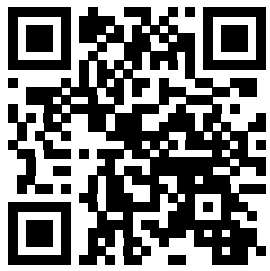
Menurut Syahganda, peluang Purbaya menerima jabatan tersebut jika diminta cukup besar, yakni sekitar 70 persen.

"Kalau menurut saya 70% okelah ya," tandasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Markas Judol di Rumah Dinas TNI Cijantung, TB Hasanuddin Desak Semuanya Diproses Hukum

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.43 WIB



BANDA ACEH — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktik judi online (judol) di rumah dinas kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diproses sesuai hukum tanpa membedakan latar belakang sipil maupun militer.

Desakan itu disampaikan setelah 11 warga sipil diamankan terkait dugaan aktivitas judi online di rumah dinas tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena lokasi yang diduga digunakan sebagai markas operasional berada di lingkungan kompleks perumahan dinas TNI.

“Baik yang melibatkan unsur sipil maupun militer, semuanya harus dilakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).

Politikus PDIP itu menegaskan, mekanisme penanganan perkara harus disesuaikan dengan pihak yang terlibat. Jika dugaan pelanggaran dilakukan personel militer, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum mili-

ter melalui Polisi Militer (POM) TNI.

Sementara itu, pihak sipil harus diproses melalui mekanisme peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila perkara melibatkan unsur sipil dan militer secara bersama-sama, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme koneksitas sesuai aturan hukum.

“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” jelasnya.

TB Hasanuddin menekankan, penegakan hukum harus berlangsung objektif dan transparan. Ia meminta tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus, termasuk apabila penyelidikan menemukan penyalahgunaan fasilitas dinas untuk aktivitas ilegal.

“Yang terpenting adalah proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga

kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

11 Warga Sipil Diamankan, Puluhan Komputer Disita

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa 11 orang yang diamankan seluruhnya merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.

Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas di lokasi tersebut.

“Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Donny dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda pendu-

duk (KTP). Sebelas orang tersebut diduga berperan sebagai operator, tetapi dugaan keterlibatan masing-masing masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di kompleks KPAD Cijantung pada Minggu (4/10/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi, mengamankan tempat kejadian, serta menyita barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan.

Lokasi kemudian dipasang garis polisi dan aliran listrik dipadamkan guna mendukung pengamanan serta proses pemeriksaan lebih lanjut.

TNI AD menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu mengungkap dan memberantas praktik judi online.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Denny Indrayana bakal Sowan ke DPR hingga Parpol, Dorong Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Okt, 18.13 WIB



BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, berencana menyambangi DPR hingga partai Politik untuk beraudiensi usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia tengah menyiapkan surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR.

“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi, kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR,” ujar Denny dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Denny mengatakan, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, DPD perlu dimintai pandangan karena merupakan salah satu unsur dalam MPR yang memiliki peran dalam proses pemakzulan.

“Bahkan kami juga sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD walaupun DPD juga sedang reses tapi ingat pemakzulan itu ada di DPR, MK kembali ke DPR, sebelum ke MPR. Dan MPR itu selain ada unsur DPR, ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat posisi DPD,” lanjut Denny.

Selain DPR dan DPD, Denny berencana menyambangi sejumlah partai politik untuk mempertanyakan sikap mereka terhadap putusan MK tersebut.

Dia secara khusus menyoroti PDIP, yang pernah mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran, serta meminta partai tersebut menyampaikan sikapnya.

“Kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai, bagaimana posisi PDIP? penting ini, Bu Mega bagaimana melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini, melakukan pembobongan publik soal syarat-syarat,” katanya.

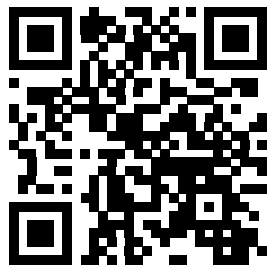
Sebelumnya, dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tenggat waktu yang kedaluwarsa

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

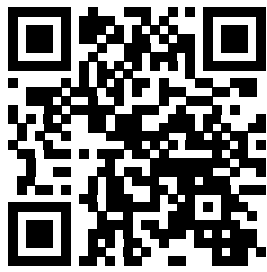
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Feri Amsari Tantang Gerindra Ajukan Pemberhentian Gibran, Cukup 25 Anggota DPR

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.34 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara Feri Amsari menantang Partai Gerindra mengambil inisiatif Politik di DPR untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu seharusnya tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintahan.

Feri menyebut Gerindra memiliki kepentingan besar untuk memastikan kredibilitas pemerintahan tetap terjaga. Karena itu, ia mempertanyakan sikap partai tersebut jika tidak mengambil langkah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam forum eksaminasi putusan MK di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Feri bahkan menyinggung kemungkinan pengajuan usulan pemberhentian Gibran melalui mekanisme konstitusional di DPR.

"Saya agak curiga kalau Gerindra tidak mengajukan pemberhentian Mas Gibran. Kenapa? Karena yang terancam kan ketua umumnya yang merupakan seorang presiden, kalau kemudian wakil presidennya memiliki cacat," kata Feri, dikutip Jumat (9/10/2026).

Akademisi Universitas Andalas itu menilai sikap pasif Gerindra dapat memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, publik bisa mempertanyakan alasan partai tersebut tidak mengambil langkah politik untuk merespons polemik yang berkembang.

"Di titik tertentu, kalau Gerindra diam, berarti wajar saja publik menduga Gerindra ikut terlibat karena mengetahui bahwa sedari awal calon wakil presidennya tidak memiliki ijazah yang sah," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Feri terhadap kemungkinan konsekuensi politik dari sikap Gerindra, bukan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan partai itu dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Feri meminta Fraksi Gerindra di DPR menunjukkan sikap yang

terancam kan ketua umumnya yang merupakan seorang presiden, kalau kemudian wakil presidennya memiliki cacat," kata Feri, dikutip Jumat (9/10/2026).

Akademisi Universitas Andalas itu menilai sikap pasif Gerindra dapat memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, publik bisa mempertanyakan alasan partai tersebut tidak mengambil langkah politik untuk merespons polemik yang berkembang.

"Di titik tertentu, kalau Gerindra diam, berarti wajar saja publik menduga Gerindra ikut terlibat karena mengetahui bahwa sedari awal calon wakil presidennya tidak memiliki ijazah yang sah," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Feri terhadap kemungkinan konsekuensi politik dari sikap Gerindra, bukan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan partai itu dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Feri meminta Fraksi Gerindra di DPR menunjukkan sikap yang

terancam kan ketua umumnya yang merupakan seorang presiden, kalau kemudian wakil presidennya memiliki cacat," kata Feri, dikutip Jumat (9/10/2026).

Akademisi Universitas Andalas itu menilai sikap pasif Gerindra dapat memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, publik bisa mempertanyakan alasan partai tersebut tidak mengambil langkah politik untuk merespons polemik yang berkembang.

"Di titik tertentu, kalau Gerindra diam, berarti wajar saja publik menduga Gerindra ikut terlibat karena mengetahui bahwa sedari awal calon wakil presidennya tidak memiliki ijazah yang sah," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Feri terhadap kemungkinan konsekuensi politik dari sikap Gerindra, bukan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan partai itu dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Feri meminta Fraksi Gerindra di DPR menunjukkan sikap yang

terancam kan ketua umumnya yang merupakan seorang presiden, kalau kemudian wakil presidennya memiliki cacat," kata Feri, dikutip Jumat (9/10/2026).

Akademisi Universitas Andalas itu menilai sikap pasif Gerindra dapat memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, publik bisa mempertanyakan alasan partai tersebut tidak mengambil langkah politik untuk merespons polemik yang berkembang.

"Di titik tertentu, kalau Gerindra diam, berarti wajar saja publik menduga Gerindra ikut terlibat karena mengetahui bahwa sedari awal calon wakil presidennya tidak memiliki ijazah yang sah," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Feri terhadap kemungkinan konsekuensi politik dari sikap Gerindra, bukan kesimpulan hukum mengenai keterlibatan partai itu dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Feri meminta Fraksi Gerindra di DPR menunjukkan sikap yang

NASIONAL

Jokowi Mencla-mencle soal Riwayat Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Okt, 09.01 WIB



BANDA ACEH -Respons Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijazah atau dokumen setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan.

"Respons Jokowi pada awal proses persidangan di MK dengan setelah putusan MK, berbeda sama sekali," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.

Sebelum sidang MK digelar, kata Erizal, Jokowi sangat lancar menjelaskan kronologi pendidikan Gibran di Indonesia, Singapura, Australia, dan balik lagi ke Singapura.

"Sementara respons Jokowi setelah putusan MK lebih banyak tentang pendidikan di luar negeri yang berbeda sama sekali dengan Indonesia," kata Erizal.

Untungnya, menurut Erizal, respons Jokowi setelah putusan MK agak mirip dengan tanggapan Gibran.

"Kalau berbeda, kan kacau juga? Respons Gibran bahwa tak mungkin dia tak lulus SMA, sementara dia kuliah S1 di Singapura, juga dipakai oleh Jokowi," kata Erizal.

Selanjutnya, sambung Erizal, komentar Jokowi agak mirip dengan penjelasan konsultan Pendidikan Ina Liem soal sistem pat-hway yang dijalankan Gibran.

"Sepertinya Ina Liem lebih paham pendidikan yang dijalankan Gibran daripada Jokowi, sejak awal," kata Erizal.

Sebetulnya, kalau ditarik lebih jauh lagi respons Jokowi terkait pendidikan Gibran yang dipersoalkan banyak orang, maka akan berbeda lagi.

Jokowi dulu mengatakan dia sendiri yang mengantarkan dan memilihkan sekolah terbaik untuk Gibran.

"Tapi entah kenapa satu persoalan yang sama, yakni pendidikan Gibran, respons Jokowi bisa

berbeda-beda dari waktu ke waktu? Aneh juga kan?" kata Erizal.

Harusnya penjelasan tentang pendidikan Gibran itu satu saja untuk selamanya dan jelas.

"Tidak pula berbeda-beda dari waktu ke Waktu," pungkas Erizal.

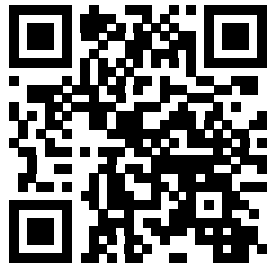
Diketahui, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

"Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa 6 Oktober 2026.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

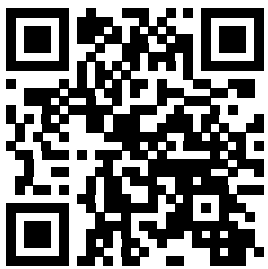
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Pasukan Berani Mati Jokowi Siap Keraahkan Jutaan Massa Lindungi Gibran dari Pemakzulan

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.55 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menyatakan kesiapannya mengerahkan jutaan massa untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila muncul upaya pemakzulan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Sukodigdo menilai dinamika Politik yang berkembang di tengah polemik mengenai posisi Gibran harus disikapi secara rasional. Menurut dia, pergantian atau pemberhentian pejabat negara tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan kelompok politik, tuntutan sesaat, ataupun perbedaan pilihan politik.

Ia berpandangan, Gibran memperoleh jabatan wakil presiden melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, hasil pemilihan yang telah ditetapkan secara resmi harus dihormati, sementara setiap persoalan yang menyangkut legiti-

masi, dugaan pelanggaran hukum, maupun pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

"Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Gibran, harus jelas apa dasar konstitusionalnya. Jangan sampai perbedaan politik kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat negara tanpa mengikuti prosedur hukum," kata Sukodigdo dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Sukodigdo menilai berkembangnya tuntutan agar Gibran dilengserkan perlu dicermati secara serius. Ia menganggap upaya yang bertujuan menjatuhkan wakil presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.

Menurut dia, demokrasi tidak hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritik

pemerintah, tetapi juga mengharuskan semua pihak menghormati aturan yang mengatur pergantian kekuasaan.

Dalam pandangannya, kritik terhadap Gibran merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari upaya pemberhentian jabatan yang mempunyai persyaratan dan prosedur konstitusional tersendiri.

Sukodigdo juga menilai bahwa pengerahan massa untuk menekan lembaga negara agar mengambil keputusan tertentu harus disikapi secara hati-hati. Aspirasi publik memang penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi keputusan mengenai jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan banyaknya orang yang turun ke jalan.

Atas dasar itu, ia menyatakan Pasukan Berani Mati Jokowi siap mengerahkan dukungan massa

untuk membela Gibran jika dinilai terdapat upaya yang menyimpang dari mekanisme konstitusi.

Salah satu alasan yang dikemukakan Sukodigdo untuk membela Gibran adalah proses pemilihan yang mengantarkannya menjadi wakil presiden.

Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bagi Sukodigdo, fakta bahwa Gibran memperoleh jabatan melalui pemilu menjadi alasan agar persoalan mengenai kelanjutan masa jabatannya tidak diselesaikan melalui tekanan politik semata.

Sukodigdo memandang polemik mengenai Gibran perlu disikapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

NASIONAL

Megawati Disebut Nyaris Gabung Pemerintahan Prabowo, Gagal karena Perebutan Kursi Menteri?

Oleh Redaksi · 9 Okt, 20.02 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Politik senior yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai dinamika internal PDIP menjadi alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri batal merapat ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, menurutnya, Megawati saat itu hampir bergabung dengan pemerintahan Prabowo, berbeda dengan posisi PDIP saat ini yang menegaskan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda dalam siniar Total Politik yang tayang pada Rabu (23/9/2026), sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom RI. "Jadi sebenarnya kalau menurut saya dulu hampir mulus bahwa Mega akan bersatu dengan Presiden Prabowo," ujarnya, dikutip Jumat (9/10).

Menurut Syahganda, batalnya rencana Megawati bergabung ke pemerintahan Prabowo bukan disebabkan oleh terpilihnya

Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Ia berpandangan bahwa ketidaksuakaan Megawati lebih ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan kepada Gibran.

"Kalau menurut saya sih internal ya, internal PDIP sendiri, kalau misalkan soal Gibran sih saya lihat enggak masuk hitungan kemarin, kan kalau Mega ini kebencian dia kan sama Jokowi enggak ada dengan anaknya," ungkapnya.

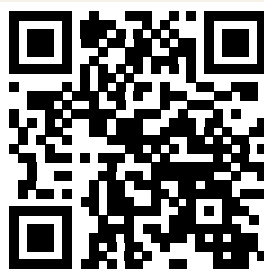
Syahganda mengaku mendengar adanya ketegangan di internal PDIP terkait pembagian jatah kursi menteri di Kabinet Merah Putih antara kelompok yang dekat dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan kelompok non-Puan. Saat itu, PDIP dirumorkan akan memperoleh tiga kursi menteri.

"Saya pikir kemarin tuh hampir mulus kan, cuman saya dengar kelompok non Puan itu melakukan gerakan karena konsesinya itu akan jatuh ke tangan kelompok Puan gitu loh," tandasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bantah Terima Suap, Mantan Ketua Ombudsman Minta Dibebaskan

Oleh Redaksi · 9 Okt, 09.05 WIB



BANDA ACEH -Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto membantah pernah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Hery saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 8 Oktober 2026.

Dalam pledoinya, Hery mengatakan tuduhan mengenai penyerahan uang kepadanya juga telah dibantah langsung oleh Agung Winarno dalam persidangan.

"Semua tidak benar ada penyerahan sejumlah uang kepada Hery Susanto," demikian pokok pembelaan Hery dalam pledoinya.

Hery juga menyinggung informasi terkait PT Gold Talen River (GTR). Menurut dia, persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh Syam Ani Rahman dalam persidangan.

Syam Ani Rahman, kata Hery, menerangkan tidak pernah ada penyerahan uang kepadanya terkait informasi mengenai PT GTR.

Oleh karena itu, Hery mempertanyakan dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan adanya pemberian atau aliran dana kepadanya hingga kemudian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Hery Susanto sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a UU Tipikor. Apa bukti dan saksinya?" kata Hery.

Hery juga menyoroti keterangan saksi Lukman Malanuag dan Edi Sugandi. Dia menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian, termasuk mengenai tempat kejadian yang dikaitkan dengan perkara.

"Jika Lukman Malanuag dan Edi Sugandi di antara mereka saja tidak sinkron dan berbeda tempat

kejadian, di mana satu saksi adalah bukan saksi," kata Hery.

Menurut Hery, ketidaksesuaian keterangan para saksi tersebut semestinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai pembuktian perkara.

"Agung Winarno sudah membantah di persidangan ini bahwa semua dakwaan yang diarahkan ke Hery Susanto adalah tidak benar," kata Hery.

Dalam pledoinya, Hery juga mempertanyakan status hukum sejumlah pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Hery menyebut dirinya bersama La Ode Sinarwan dan Agung Winarno telah dijadikan tersangka dan terdakwa.

Sementara Edi Sugandi disebut berstatus tersangka dan tahanan kota. Namun, Hery mempertanyakan mengapa Lukman Malanuag, yang menurutnya menjadi sumber persoalan dalam perkara PT Toshida dan disebut memperoleh fee konsultan dari PT Toshida Indone-

sia, tidak dijadikan tersangka dan terdakwa.

Sementara itu, penasihat hukum Hery Susanto menyatakan tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan kliennya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu hingga keempat.

Penasihat hukum menyebut tidak terdapat keterangan saksi, petunjuk, alat bukti, maupun barang bukti yang menunjukkan Hery menerima hadiah atau janji sebagaimana didakwakan JPU.

"Tidak terdapat satu keterangan pun dari saksi dan atau petunjuk dan atau alat bukti serta tidak ada barang bukti yang dihadirkan atau ditunjukkan yang menyatakan dan atau setidaknya mengindikasikan adanya perbuatan Terdakwa Hery Susanto," demikian isi nota pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum.

NASIONAL

Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Wapres Gibran, PDIP: Bukan Instruksi Partai

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.48 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono menegaskan, aksi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Rojab Asy'ari yang mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan pribadi. Menurutnya, tidak ada arahan dari partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP, terkait aksi tersebut.

Ono mengatakan, tindakan Rojab diduga merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Gibran.

Meski demikian, dia menekankan PDIP sebagai institusi tidak pernah menyampaikan sikap resmi terkait polemik tersebut.

"Setelah saya lihat videonya dan langsung juga saya hubungi yang bersangkutan, sikap tersebut merupakan sikap pribadi, sikap personal dari Pak Rojab, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi," kata Ono, Jumat (9/10/2026).

Dia menjelaskan, PDIP tidak memiliki kepentingan dalam per-

soalan itu. Karena itu, aksi pencopotan foto Gibran tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi partai.

"Karena memang tidak pernah ada instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD, maupun dari DPP," ujarnya.

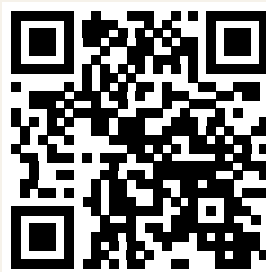
Ono menambahkan, setiap kader memiliki hak untuk menyampaikan sikap pribadi dan hal tersebut patut dihormati selama tidak berkaitan dengan kebijakan maupun program partai. Sebaliknya, apabila menyangkut kepentingan organisasi, seluruh kader wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, aksi Rojab mencopot foto Gibran Rakabuming Raka menjadi viral di media sosial setelah MK membacakan putusan atas gugatan terkait persyaratan pendidikan wakil presiden. Aksi tersebut kemudian memicu beragam tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun menentangnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

NasDem Kaji Putusan MK soal Ijazah Gibran, Sikap terhadap Pemakzulan Belum Jelas

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.46 WIB



BANDA ACEH — Partai NasDem belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih menghimpun aspirasi pengurus wilayah sebelum membahasnya di tingkat pusat.

Langkah tersebut dilakukan di tengah berkembangnya wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran setelah MK menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan wakil presiden tidak dapat diterima.

Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, partainya masih mempelajari substansi putusan MK dan belum mengeluarkan pernyataan resmi.

"NasDem sedang mendalami putusan MK, belum mengeluarkan

statement tentang itu," ujar Hermawi saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).

Hermawi mengatakan, DPP NasDem saat ini mengumpulkan pandangan dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Seluruh masukan tersebut akan dibahas sebelum partai menentukan sikap.

"Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW lalu kita akan diskusikan di tingkat pusat," tuturnya.

Hermawi mengakui, pandangan yang berkembang dalam proses pembahasan internal NasDem masih beragam. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan kecenderungan sikap pengurus wilayah, termasuk mengenai wacana penggunaan hak pemakzulan terhadap Gibran.

"Pendapatnya macam-macam

dalam proses penggodokan, sabar," kata Hermawi.

Saat ditanya apakah terdapat pengurus DPW yang mendukung pengajuan pemakzulan, Hermawi tidak memberikan jawaban tegas.

"He-he-he,... nanti aja," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan NasDem belum mengambil posisi terbuka terhadap wacana pemakzulan Gibran. Keputusan partai masih menunggu hasil pembahasan internal di tingkat pusat.

Gugatan mengenai persyaratan pendidikan atau ijazah Gibran terdaftar di MK dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara itu diajukan 12 pemohon pada 10 September 2026.

Para pemohon berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, serta sejumlah warga

yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pemohon lainnya adalah M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO).

MK beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan peserta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Putusan tersebut berkaitan dengan aspek kedudukan hukum para pemohon. Karena itu, putusan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pembuktian substantif atas benar atau tidaknya persoalan ijazah Gibran

NASIONAL

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur Sebagai Wapres: Anda Harus Bersikap Negarawan

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.50 WIB



BANDA ACEH - - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Pernyataan itu disampaikan Rocky menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meyakini bahwa tidak ditemukan ijazah SMA milik Gibran.

Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan juga mesti disikapi agar tidak ada amuk massa atas hadirnya fakta yang terungkap dalam putusan MK tersebut.

"Hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi itu yang mau saya cairkan. Karena itu, di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri," kata Rocky dalam siniar Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (9/10).

"Ini mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikaitkan dengan pasangannya yang ilegal. Karena itu tindakan awal untuk meminta, 'Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan' itu," sambungnya.

Rocky memandang, putusan MK yang tidak menerima gugatan Denny Indrayana dkk atas syarat pendidikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming

Raka pada Pilpres 2024, sebagai bentuk cuci tangan. Sebab, MK dinilai memberikan bola liar kepada DPR RI untuk menindatkan putusan tersebut.

"Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, karena dua-duanya dimenangkan itu. Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR," ujarnya.

Pasalnya, MK menyatakan tidak berwenang untuk mendiskualifikasi Gibran. Karena saat ini Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden RI.

"Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR, jadi dia kirim bola panas ke DPR itu," tuturnya.

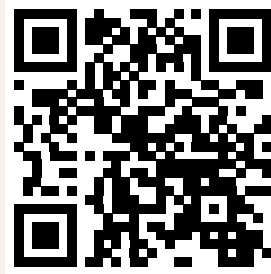
Karena itu, ia juga menyarankan agar DPR RI dapat menindatkan putusan MK tersebut. Hal itu penting, agar polemik yang berkaitan dengan ijazah Gibran tidak berkepanjangan.

"Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR, jadi masalah Politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada 'Dinasti Jokowi'," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung Sebut Gibran Sebaiknya Mundur untuk Cegah Amuk Massa

Oleh Redaksi · 9 Okt, 14.14 WIB



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan.

Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat meredam kemarahan publik yang telah terakumulasi akibat polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya tersebut. Langkah itu juga dinilai dapat mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam persoalan tersebut.

"Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata

Rocky dalam potongan video YouTube Akbar Faizal, dikutip Jumat (9/10/2026).

Ia menilai putusan MK telah membawa persoalan tersebut ke ranah Politik. Menurut dia, DPR menjadi pihak yang perlu menindaklanjuti persoalan itu setelah putusan dibacakan.

Rocky berpandangan, putusan MK justru berpotensi mengalihkan keresahan publik ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

"Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu," ujarnya.

Meski demikian, Rocky mengingatkan agar kemarahan masyarakat tidak berkembang menjadi

aksi massa. Ia menilai akumulasi kekecewaan publik terkait polemik ijazah Jokowi hingga Gibran berpotensi memicu tuntutan hukuman moral terhadap keluarga Jokowi.

"Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada dinasti Jokowi," jelas Rocky.

Jangan Kaitkan dengan Prabowo

Ia juga mengingatkan agar persoalan yang menyangkut Gibran tidak dikaitkan dengan Prabowo. Menurut dia, keterlibatan Presiden dalam polemik tersebut berpotensi

menempatkan Prabowo dalam tekanan opini publik.

"Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden. Bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman wapresnya tuh," tegasnya.

Lebih jauh dia menilai Presiden sebaiknya tidak terpancing untuk memberikan komentar di tengah situasi tersebut.

"Maka presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu ketika psikologi publik menuntut supaya Pak Presiden dipancing untuk terlibat memberi komentar. Nggak boleh," tutup Rocky.

NASIONAL

Sama-sama 'Pewaris PSI'? Alasan Rocky Gerung dan Prabowo Dinilai Satu Frekuensi

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.09 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Politik senior yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai Rocky Gerung dan Presiden Prabowo Subianto merupakan dua sosok yang dapat disebut sebagai "pewaris PSI".

Syahganda menjelaskan, PSI yang dimaksud bukan Partai Solidaritas Indonesia, melainkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan Sutan Sjahrir pada 12 Februari 1948 di Yogyakarta.

Ia berpandangan kesamaan frekuensi ideologis tersebut menjadi salah satu alasan Rocky tidak terlaru vokal mengkritik Prabowo. Menurutnya, Rocky baru akan berseberangan dengan Prabowo apabila nilai-nilai yang diyakininya dilanggar.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda dalam siniar Total Politik yang tayang pada Rabu (23/9/2026), sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom RI.

"Saya lihat Rocky kan juga menunggu kalau misalkan Prabowo pada akhirnya terjebak pada korupsi atau terjebak pada pengkhianatan ideologi pasti dia akan nyerang Rocky itu," ujarnya dikutip Jumat (9/10).

Syahganda berpandangan Rocky dan Prabowo berada dalam satu frekuensi ideologis.

"Satu server, itu sama (dalam ideologi). Saya belum lihat ada perbedaan gitu loh. Kalau saya kan juga ya mungkin saya lebih lebih di luar dikit tapi saya juga menghormati pilihan-pilihan sosialistiknya Rocky dan Prabowo," tandasnya.

Sebagai informasi, Rocky Gerung saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

NASIONAL

Surat Pemakzulan Gibran Beredar, Nama Kader NasDem Terseret!

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.58 WIB



BANDA ACEH – Surat pemakzulan Gibran beredar dan menyeret nama kader NasDem. DPR disorot, tetapi partai membantah surat itu sebagai sikap resmi.

Surat seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menjadi sorotan setelah beredar di kalangan wartawan.

Bukan cuma soal usulan pemberhentian orang nomor dua di Indonesia itu, dokumen tersebut juga mencantumkan nama Tonny Tesar, anggota DPR/MPR RI dari Fraksi NasDem.

Dokumen bertajuk Impeachment GRR 071026 itu memiliki nomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 dan tertanggal 7 Oktober 2026.

Isinya meminta pimpinan DPR RI menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran melalui mekanisme konstitusional.

Namun, kemunculan surat tersebut langsung memunculkan pertanyaan: apakah benar NasDem mendorong pemakzulan Gibran?

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni justru memberikan bantahan tegas.

Sahroni menegaskan belum ada sikap resmi partainya untuk menempuh mekanisme pemakzulan terhadap Gibran di DPR.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, juga menyatakan akan mengecek dan mengklarifikasi dokumen yang beredar.

"Terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi, nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi," ujar Saan.

Menurut Saan, NasDem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi latar belakang polemik tersebut

NASIONAL

Disentil Berbalik Arah Masuk Pemerintahan, Rocky Gerung: Mantan Masih Mantau

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.23 WIB



BANDA ACEH — Langkah Politik Rocky Gerung yang bergabung ke lingkaran Istana memicu gelombang kekecewaan di kalangan pendukungnya. Pengamat Politik tersebut mendulang kritik pedas di media sosial usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Rocky menanggapi santai sorotan publik yang mengarah padanya.

Sikap tenang itu ditunjukkannya se usai menghadiri rapat perdana Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Saat wartawan men-

cecar pertanyaan mengenai banyaknya pendukung yang merasa kecewa, Rocky melontarkan selorohan khasnya.

"Siapa yang nyindir gua? Ya biasa itu kontroversi..." kata Rocky santai di Istana Kepresidenan, Kamis (8/10/2026).

Ketika ditegaskan kembali bahwa tidak sedikit pihak menyangkan keputusannya untuk berbalik arah masuk ke dalam jajaran pemerintahan, Rocky memberikan jawaban singkat yang menggelitik.

"Itu artinya mantan masih mantau," kelakarnya

NASIONAL

Mahfud MD: Gibran Memang Tidak Ada Ijazah, Dicari sampai Mati pun Tidak akan Ada

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.21 WIB



BANDA ACEH - Polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyampaikan pandangannya.

Ia meyakini ijazah SMA Gibran memang tidak ada, merujuk pada pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA yang ditempuh Gibran di luar negeri.

"Memang tidak ada (ijazah), karena ketika MK mengatakan tidak menemukan itu, memang karena ijazah tidak ada, sehingga

dicari penyetaraannya," kata Mahfud saat hadir sebagai narasumber dalam program ROSI yang tayang di KompasTV, Kamis (8/10/2026).

Karena tidak ada ijazah, MK kata Mahfud, kemudian mempersoalkan bukti penyetaraan yang diajukan dalam perkara tersebut. Mahfud menilai, jika bukti penyetaraan tidak ditemukan, maka dokumen yang dapat membuktikan kesetaraan pendidikan dengan ijazah SMA juga tidak terbukti dalam proses persidangan.

"Penyetaraan ini yang tidak benar menurut MK. Tidak ditemukan bukti penyetaraan berarti ijazahnya tidak ada. Karena itu adalah proses pembuktian penga-

dilan tentang ijazah atau yang setara. Ini kan tidak ada," ujarnya.

Atas dasar itu, Mahfud mengatakan MK menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga lain yang dinilai berwenang menindaklanjuti.

"Jadi MK sudah benar bilang ijazah tidak ada, dan pasti tidak ada. Dicari sampai mati pun tidak akan ada ijazah," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menanggapi pertanyaan mengenai apakah putusan MK berarti majelis menilai sertifikat yang dimiliki Gibran tidak setara dengan ijazah SMA.

"Itu tidak setara dengan ijazah, hanya setara dengan kemampuan kan katanya ya, apa istilahnya tuh di dalam itu kan ini mempunyai

keahlian yang setara dengan ini, bukan setara dengan ijazah, dengan SMA," jelas Mahfud.

Selain persoalan penyetaraan, Mahfud turut menyinggung dugaan cacat administratif pada dokumen yang dibahas. Ia mencontohkan adanya ketidaksesuaian keterangan bidang studi yang disebutkan dalam dokumen tersebut.

"Apalagi juga yang disampaikan itu ada cacat administratif, kalau dibilang dia belajar di bidang akuntansi tapi ditulisnya di bidang bisnis gitu ya, dan sebagainya dan itu juga masalah, sehingga disetarakan pun jadi susah gitu," imbuhnya.

NASIONAL

PDIP Buka Suara Soal Ijazah Gibran: Mengundurkan Diri Langkah Lebih Terhormat

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.26 WIB



BANDA ACEH — Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil langkah bijak dengan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti kelengkapan ijazah setara SMA milik Gibran pada syarat pencalonan Pilpres 2024.

Komarudin menilai, pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah terhormat bagi seorang pimpinan negara yang kerap mengagungkan ketaatan terhadap hukum.

"Kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa—dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus—MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik," ujar Komarudin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa jika opsi pengunduran diri tidak diambil, DPR memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan

majelis hakim peradilan konstitusi tersebut. Ia menegaskan, MK telah menyerahkan tindak lanjut perkara ini kepada lembaga legislatif, yang dalam ranah ketatanegaraan dapat mengarah pada mekanisme pemakzulan (impeachment).

"Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR," tuturnya.

Lebih lanjut, Komarudin menekankan pentingnya menegakkan etika dalam bernegara demi menjaga marwah lembaga kepresidenan dan parlemen.

"Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas," tegasnya.

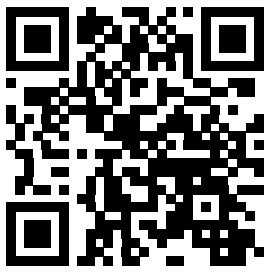
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP di DPR hingga kini belum menggelar rapat resmi untuk menentukan langkah Politik selanjutnya. Kendati begitu, opsi penggunaan hak-hak parlementer seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) maupun penggunaan Hak Angket masih sangat terbuka.

"Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini mau apa," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.56 WIB



BANDA ACEH -Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ada bukti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejatinya bisa menjadi celah atau pintu masuk memakzulkan Gibran.

Sebab, tanpa ada bukti ijazah, maka salah satu persyaratan Gibran untuk menjadi cawapres dengan sendirinya tidak terpenuhi.

"Karena itu, posisi Gibran saat ini sebagai wapres bisa saja dinilai tidak sah. Celah ini dapat digunakan DPR untuk memproses pemakzulan Gibran melalui Hak Angket," kata pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga

kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Kendati demikian, Jamiluddin menilai bahwa untuk memakzulkan Gibran tampaknya tidak mudah. Sebab, mengandalkan Fraksi PDIP saja di Senayan tidak cukup untuk menggolkan Hak Angket.

"Untuk bisa meloloskan Hak Angket setidaknya harus memenuhi dua syarat. Pertama, jumlah pengusul paling sedikit 25 orang anggota DPR. Dua, harus didukung oleh lebih dari 1 fraksi di DPR," kata Jamiluddin.

Atas dasar itu, Jamiluddin menyebut bahwa sekalipun 110 anggota DPR dari PDIP mengusulkan Hak Angket, tetap saja

tidak memenuhi syarat. Sebab, syarat dukungan harus lebih dari satu fraksi di DPR tidak terpenuhi.

"Untuk mendapatkan dukungan lebih dari satu fraksi, PDIP sebenarnya bisa melobi satu saja dari partai koalisi. Namun hal itu tidak mudah karena harus mendapat restu dari Prabowo sebagai Ketum Gerindra," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

Meski gugatannya tidak diterima, putusan MK menyatakan

Gibran tak punya ijazah setingkat SMA tapi tak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Sidang putusan PHPU terkait Gibran itu digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Adapun gugatan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh sedikitnya 12 orang, yang terdiri dari beberapa individu termasuk Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, hingga sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat.

NASIONAL

Viral Copot Foto Gibran Usai Putusan MK, PDIP Jabar Angkat Bicara

Oleh Redaksi · 9 Okt, 18.17 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menegaskan, aksi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Rojab Asy Ari mencopot foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan pribadi. Dia memastikan tidak ada instruksi dari partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP.

Ono menilai, aksi tersebut merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Namun, dia menuturkan, PDIP secara kelembagaan tidak pernah mengeluarkan sikap terkait persoalan tersebut.

"Itu personal ya, mungkin bukan hanya Pak Rojab tapi seluruh rakyat mengamati betul terkait dinamika yang terjadi, MK telah

memutuskan. Jadi saya rasi itu terkait perasaan personal saja," ujar Ono, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, partai tidak memiliki kepentingan dalam polemik itu. Aksi pencopotan foto Gibran dinilai tidak bisa dikaitkan dengan sikap resmi PDIP.

Dia menyampaikan, sikap pribadi kader patut dihormati selama tidak menyangkut kebijakan atau program partai. Namun, jika berkaitan dengan partai, setiap kader harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, aksi Rojab Asy Ari mencopot foto Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial setelah MK membacakan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden. Aksi tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat

NASIONAL

Putusan MK soal Gibran Jangan Berhenti Jadi Catatan Sejarah

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.09 WIB



BANDA ACEH -Pengamat Politik Adi Prayitno menilai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi penentu arah dinamika Politik berikutnya.

Menurut Adi, perhatian kini tertuju pada kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil langkah lanjutan setelah MK membacakan putusannya.

"Apakah setelah putusan MK ini akan ada pihak-pihak yang melakukan gerakan untuk mem-follow

up?" ujar Direktur Parameter Politik Indonesia itu, Jumat, 9 Oktober 2026.

Selain itu, Adi mempertanyakan bagaimana suasana kebatinan di DPR dalam menyikapi putusan tersebut. Ia membuka kemungkinan adanya pihak tertentu yang mendorong tindak lanjut, termasuk melalui inisiatif maupun manuver politik di parlemen.

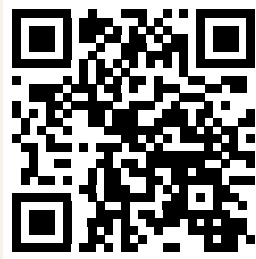
Adi menilai, dinamika selanjutnya akan ditentukan oleh langkah konkret para aktor politik. Ia mempertanyakan apakah putusan tersebut akan memicu gerakan

politik lanjutan atau justru berakhir tanpa tindak lanjut berarti.

"Atau jangan-jangan hanya akan selesai begitu saja, hanya akan menjadi bukti sejarah dan menjadi berita politik yang tidak berkesudahan," ucapnya.

Menurut Adi, DPR menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan persoalan ini. Langkah yang diambil para anggota parlemen akan menentukan apakah putusan MK tersebut berlanjut menjadi dinamika politik baru atau berhenti sebagai catatan dalam perjalanan politik nasional.

BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co-id



Pindai untuk berita terbaru

NASIONAL

Heboh Pengadaan Video Dokumenter Rp 1,37 Miliar, BGN: Itu Era Kepala Sebelumnya

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.53 WIB



BANDA ACEH - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons informasi terkait pemberitaan mengenai pengadaan paket pembuatan video dokumenter senilai Rp1,37 miliar yang saat ini menjadi perhatian publik.

Juru bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan, setelah dilakukan pengecekan proyek video dokumenter tersebut terjadi di masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, yakni di rentang periode bulan Maret, April, hingga Mei 2026 yakni saat kepemimpinan Dadan Hindayana.

"Di mana pada bulan-bulan tersebut, Kepala BGN saat ini, yaitu Bapak Sudaryono, belum menjabat sebagai Kepala BGN," kata Tysa melalui video pernyataan yang diunggah akun instagram resmi BGN, dikutip Jumat (9/10).

Oleh karena itu, Tysa mengatakan, informasi mengenai pengadaan perlu dilihat sesuai dengan konteks waktu, tahapan, serta

proses administrasi yang berlangsung pada saat pengadaan dilaksanakan.

"Dan kalau kita lihat merujuk pada waktu, Pak Sudaryono dipercaya menjadi Kepala BGN itu sejak Juli 2026. Jadi proyek film dokumenter tidak terjadi di masa kepemimpinan Kepala BGN saat ini," ungkapnya.

Dalam keterangannya, BGN menghargai perhatian dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan pengadaan pemerintahan yang berlaku.

Sejalan dengan penguatan tata kelola kelembagaan, BGN terus melakukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pengadaan, pengawasan, serta pengelolaan anggaran agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

NASIONAL

KPK Tegur Nusron Wahid Usai Mangkir, Janji Kooperatif Dipertanyakan

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.29 WIB



BANDA ACEH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan menghadiri agenda internal kementerian. KPK meminta Nusron memenuhi pemanggilan ulang dan membuktikan komitmennya untuk menghormati proses hukum.

Ketua KPK Setyo Budiyo menilai alasan ketidakhadiran tersebut perlu menjadi perhatian. Menurutnya, penyidik telah mengirimkan surat panggilan sejak pekan sebelumnya sehingga Nusron semestinya dapat mengatur jadwal untuk memenuhi pemeriksaan.

Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron pada 18 September lalu yang menyatakan kesediaannya menghormati dan membantu proses hukum yang ditangani KPK.

“Menteri ini kan pernah menyatakan di media, hari Jumat, 18 September bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap, yang bersangkutan komitmen,” tegas Setyo kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai alasan adanya agenda kementerian tidak cukup menjelaskan ketidakhadiran Nusron, mengingat surat panggilan telah disampaikan sebelumnya.

“Jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian,

sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo turut meminta Nusron bersikap kooperatif dan hadir pada jadwal pemeriksaan berikutnya. Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan tidak menimbulkan kesan menghambat proses penegakan hukum.

“KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-nunda penegakan hukum,” ujar Budi.

Menurut Budi, keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

KPK kini menunggu Nusron memenuhi pemanggilan ulang agar penyidik dapat mendalami informasi yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut.

Pemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk. KPK membutuhkan keterangan para pihak untuk menelusuri proses pengurusan hak atas tanah tersebut serta mengungkap rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyidikan

NASIONAL

Ormas PEJABAT Desak Gibran Mundur atau Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.53 WIB



BANDA ACEH - — Dewan Pimpinan Ormas Pengacara & Jawara Bela Ummat (PEJABAT) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait kondisi perpolitikan dan kepemimpinan nasional. Pernyataan sikap bernomor 001/PS/DPP-PEJABAT/Rabiul Akhir/1448 H tersebut menyoroti kepemimpinan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP Ormas PEJABAT, Ustadz H. Eka Jaya, menegaskan bahwa ormasnya menolak keras segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai mencederai demokrasi serta merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang sah.

“Kami menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dikarenakan tidak memenuhi asas moral, etika, dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat,” ujar Ustadz H. Eka Jaya.

Lebih lanjut, Ustadz Eka Jaya menyampaikan bahwa apabila tuntutan pengunduran diri secara sukarela tersebut tidak dipenuhi, Ormas PEJABAT mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil langkah konstitusional.

“Apabila tidak mundur secara sukarela, kami mendesak MPR

untuk segera menempuh proses pemakzulan (impeachment) sesuai mekanisme konstitusi UUD 1945,” tegasnya.

Selain menuntut pemakzulan, Ormas PEJABAT juga mengeluarkan beberapa poin pendorong untuk menjaga kondusivitas hukum dan demokrasi di Indonesia. Petama terkait netralitas penegak hukum. Ormas PEJABAT mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum agar bersikap netral, tidak tebang pilih, dan memproses segala dugaan pelanggaran hukum tanpa adanya intervensi kepentingan Politik.

Kedua, mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, ormas, mahasiswa, hingga tokoh ulama untuk bersatu mengawal demokrasi, keadilan, dan kebenaran.

Pernyataan sikap resmi yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Oktober 2026 (26 Rabiul Akhir 1448 H) ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum H. Eka Jaya bersama Sekretaris Umum H. Subuh Raja.

Ustadz Eka Jaya menegaskan bahwa sikap ini diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi kepentingan bangsa, negara, serta penyelamatan demokrasi.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Oleh Redaksi · 9 Okt, 08.52 WIB



BANDA ACEH -Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Politik Joko Widodo (Jokowi) selama lebih dari satu dekade.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, persoalan tersebut kini telah berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, yakni menyangkut konstitusi dan negara.

Karena itu, Amir meminta Presiden Prabowo Subianto tidak melihat persoalan tersebut hanya sebagai dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Gibran.

“Kesimpulannya, Jokowi, anak dan pengikutnya sudah bertanam, sekarang saatnya menuai,” kata Amir, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.

Namun, Amir memberikan perumpamaan keras mengenai konsekuensi dari proses politik tersebut.

“Persoalannya, yang menanam ilalang tidak mungkin memetik padi,” kata Amir.

Ia menegaskan, persoalan yang berkembang setelah putusan MK tersebut menurutnya bukan semata persoalan pribadi antara Jokowi, Gibran dan Prabowo.

“Ini persoalan Jokowi, Gibran dengan konstitusi dan negara,” kata Amir.

Karena itu, Amir meminta Prabowo memberikan perhatian serius terhadap perkembangan setelah putusan MK.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola politik “gali lubang tutup lubang”, yakni setiap persoalan politik dise-

lesaikan dengan kompromi politik baru

Amir juga menyoroti komunikasi antara Jokowi dan Prabowo di tengah perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dinamika politik yang berkembang.

“Seolah-olah kalau ada masalah, Jokowi meminta bertemu Prabowo. Keputusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pertemuan Jokowi dan Prabowo,” kata Amir.

Meski demikian, Amir menilai Prabowo harus berhati-hati dalam merespons persoalan tersebut. Sebab, menurut dia, kesalahan mengambil sikap justru dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo.

“Bahkan bisa mengubah politik, khususnya menuju 2029,” pungkas Amir.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam, 6 Oktober 2029.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu,” kata Arsul.

NASIONAL

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Oleh Redaksi · 9 Okt, 08.55 WIB



BANDA ACEH -Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah partai Politik menyatakan sikapnya secara beragam

“Belum terlihat secara tegas suara masing-masing fraksi DPR terkait perkembangan setelah putusan MK. Ini sangat janggal,” kata Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.

Menurut Amir, sejumlah partai seperti PDIP, Partai NasDem dan Partai Demokrat perlu memperjelas sikap melalui fraksinya masing-masing.

“Yang menjadi persoalan, apa suara PDIP, NasDem, Demokrat mewakili fraksi masing-masing? Sampai sekarang kita masih menunggu suara dari fraksi-fraksi,” kata Amir.

Amir juga menyebut kemungkinan penggunaan Hak Angket sebagai salah satu instrumen politik DPR. Namun, ia mengingatkan agar hak angket tidak justru membelokkan persoalan utama.

“Kalau ada hak angket, persoalannya Gibran dan Presiden Prabowo diminta keterangan. Jangan sampai masalahnya dibelokkan. Ini politik yang patut diperhatikan,” kata Amir.

Lebih jauh, Amir mengingatkan adanya potensi konflik horizontal apabila persoalan tersebut terus membesar tanpa respons kelembagaan yang jelas.

Ia menilai dukungan demonstratif kelompok pendukung Gibran dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas.

“Pendukung Gibran demonstratif memberikan dukungan. Ini sentilan bagi Prabowo dan bisa berdampak pada Pilpres 2029,” kata Amir.

Menurutnya, dinamika tersebut perlu dibaca secara strategis karena narasi mengenai putusan MK dapat terus berkembang dan memengaruhi persepsi publik.

“Perkembangan ini dipengaruhi intelijen strategis. Narasinya semakin membesar dan dapat memengaruhi dinamika politik,” kata Amir.

Amir bahkan mengingatkan adanya kemungkinan kelompok-kelompok global memanfaatkan kondisi politik dalam negeri Indonesia.

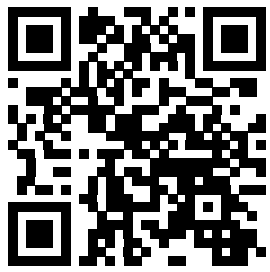
Ia menyebut skenario politik hingga 2030 perlu diantisipasi apabila persoalan domestik tidak dikelola dengan baik.

“Harus ada ketegasan Prabowo kepada Jokowi bahwa kasus ini adalah masalah konstitusi dengan negara,” kata Amir.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

12 BERITA

LIFESTYLE

Warung Kopi Pangku Muncul di PIK, Makan Mi Instan Saja Sampai Dipangku Cewek

Oleh Redaksi · 9 Okt, 20.18 WIB

NGOPI SAMBIL DIPANGKU CEWEK CANTIK



BANDA ACEH – Warung kopi pangku di PIK viral di media sosial. Pengunjung terlihat makan mi instan sambil dipangku wanita, bikin warganet penasaran.

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) mendadak menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan aktivitas sebuah warung kopi pangku viral di media sosial.

Bukan sekadar tempat nongkrong untuk menyeruput kopi, kedai tersebut menarik perhatian karena memperlihatkan pelanggan yang menikmati mi instan sambil dipangku seorang wanita.

Video yang beredar di TikTok itu sontak mengundang rasa penasaran warganet.

Pasalnya, konsep warung kopi pangku yang selama ini identik dengan sejumlah kawasan jalanan dan pelabuhan kini menjadi pembincangan di tengah citra PIK sebagai kawasan komersial modern.

Dalam rekaman tersebut, suasana kedai terlihat remang-remang dengan musik yang terdengar cukup kencang.

Sekilas, tempat itu tampak seperti warung kopi sederhana yang menyediakan makanan dan minuman bagi pengunjung.

Namun, ada pemandangan tak biasa yang membuat video tersebut cepat menarik perhatian.

Salah seorang pelanggan terlihat sedang menyantap mi instan berkuah sambil duduk di pangkuan seorang wanita berambut panjang.

Wanita itu tampak menemani pelanggan tersebut ketika menikmati makanannya.

Pemandangan inilah yang kemudian menjadi sorotan utama dalam video viral tersebut.

Aktivitas sederhana seperti makan mi instan mendadak terlihat berbeda karena berlangsung dengan konsep pelayanan yang tak lazim bagi sebagian pengunjung.

Tak hanya menampilkan suasana warung kopi pangku, video itu juga memperlihatkan interaksi dua pengunjung dengan seorang wanita yang diduga sebagai pengelola tempat tersebut.

Wanita yang disebut-sebut dijuluki Mami itu menghampiri meja

pengunjung dan menanyakan pesanan mereka.

Sapaan yang sebenarnya terdengar biasa tersebut justru membuat suasana menjadi canggung.

Dua pria yang merekam pengalaman mereka tampak tertawa gugup ketika menghadapi situasi tersebut.

Reaksi mereka memperlihatkan campuran rasa penasaran dan kebingungan saat mencoba memahami suasana kedai yang baru mereka datangi.

Musik yang mengiringi aktivitas di dalam warung turut menambah kesan ramai.

Di tengah suasana tersebut, kamera merekam sejumlah detail yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di media sosial.

Video itu pun memancing rasa ingin tahu publik.

Sebagian orang penasaran dengan konsep pelayanan yang ditawarkan, sementara lainnya mempertanyakan seperti apa sebenarnya aktivitas usaha di lokasi tersebut.

Munculnya warung kopi pangku di kawasan PIK menjadi salah satu hal yang membuat fenomena ini ramai diperbincangkan.

PIK selama ini dikenal dengan beragam tempat kuliner, pusat hiburan, serta kawasan komersial yang menawarkan gaya hidup modern.

Kehadiran tempat dengan konsep kopi pangku menghadirkan kontras dengan gambaran kawasan tersebut yang selama ini melekat di benak masyarakat.

Istilah kopi pangku sendiri merujuk pada konsep warung kopi yang menawarkan interaksi personal antara pelanggan dan pendamping wanita.

Praktik semacam ini bukan hal baru di Indonesia, meskipun keberadaan dan bentuk operasionalnya dapat berbeda di setiap tempat.

Dalam video yang beredar, konsep tersebut terlihat melalui pelanggan yang ditemani wanita saat menikmati makanan.

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

TEKNOLOGI

7 Rekomendasi Kamera untuk Pemula yang Mau Jadi Content Creator

Oleh Redaksi · 9 Okt, 19.31 WIB



Jakarta, 9 Oktober 2026. Kamera pertama sering jadi keputusan yang tertunda berbulan-bulan. Bukan karena harganya, tapi karena bingung mana yang tidak bikin menyerah di minggu pertama.

Kekawatirannya masuk akal. Kamera yang menuntut pemakainya memahami belasan pengaturan sebelum bisa merekam hal sederhana cenderung berakhir di lemari.

Tujuh kamera berikut dipilih dengan satu pertanyaan: seberapa cepat pemula bisa mulai merekam tanpa harus belajar dulu. Sebagian besar yang mencari kamera terbaik untuk TikTok Creator ada di segmen ini, mereka yang memulai dari nol.

Ketersediaan garansi resmi di Indonesia juga masuk pertimbangan, karena kamera pertama biasanya dipakai bertahun-tahun.

1. Canon EOS R50 V

Canon EOS R50 V dirancang supaya langkah pertamanya sesingkat mungkin, dan itu yang membuatnya sering disebut sebagai kamera terbaik untuk pemula 2026.

Begitu kamera diposisikan tegak, antarmuka di layar berputar sendiri mengikuti orientasi. Vertical Tripod Mount sudah tertanam di bodi, jadi pemula tidak perlu tahu apa itu L-bracket atau membelinya lebih dulu. Hasil rekaman langsung sesuai format TikTok dan Reels.

Tombol rekamnya ditaruh di depan bodi. Ini terdengar sepele sampai seseorang mencoba merekam diri sendiri dan harus bolak-balik ke belakang kamera setiap kali mulai dan berhenti.

Untuk fokus, sistem auto focus Dual Pixel CMOS AF II bekerja otomatis dengan cakupan hingga 100 persen bidang gambar. Pemula tidak perlu memahami mode fokus manual untuk menda-

pat hasil yang tajam. Warna kulit juga sudah natural langsung dari kamera, jadi tidak ada keharusan mempelajari penyesuaian warna hanya supaya wajah tampil bagus. Kalau ingin gaya visual tertentu, tersedia 14 filter warna bawaan yang tinggal dipilih saat merekam.

Ketika nanti mulai mencoba siaran langsung, satu kabel USB-C ke laptop sudah cukup, sekaligus memasok daya sepanjang sesi. Untuk pemula yang menyiapkan anggaran sekitar 12 juta dan ingin sekalian bisa livestream, tidak ada perangkat penangkap sinyal yang perlu dibeli terpisah.

Catatannya, kamera ini tidak punya stabilisasi dalam bodi. Untuk perekaman dari tripod atau posisi diam, itu tidak jadi soal.

"Kemudahan di EOS R50 V bukan hasil pengurangan kemampuan. Layar yang berputar sendiri dan tombol rekam yang terjangkau itu keputusan desain, supaya kreator bisa mulai merekam di hari pertama," ujar Monica Arya-setiawan, Canon Business Unit Director PT Datascip, dalam keterangannya kepada wartawan.

Harganya Rp12.300.000 untuk versi body only, dipasarkan PT Datascip selaku distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia lewat Official Store Canon Indonesia di Tokopedia, dengan garansi resmi dua tahun untuk kamera dan lensa.

2. Sony ZV-E10 II

Sensor APS-C 26 megapiksel dan ekosistem lensa E-mount yang luas jadi nilai tambahnya untuk jangka panjang. Product Showcase Setting-nya memudahkan saat menampilkan produk ke kamera.

Harganya di kisaran Rp15.500.000 ke atas, jadi perlu anggaran lebih dibanding beberapa pilihan lain di daftar ini.

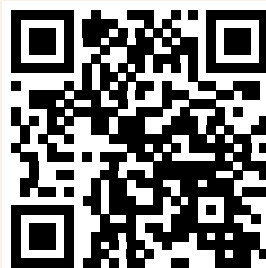
3. Nikon Z30

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

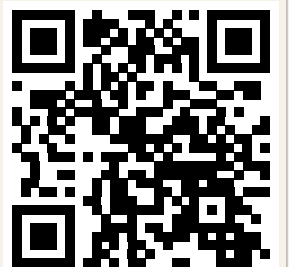
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Gibran: Ujian Legitimasi dan Stabilitas Politik

Oleh Redaksi · 9 Okt, 18.09 WIB



Oleh: Safriady((Penulis adalah Pemerhati Isu Politik))

ESAKAN agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kini memasuki babak baru.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 terkait perkara syarat pendidikan Gibran, sejumlah suara publik, akademisi, politikus, dan pihak yang menjadi pemohon perkara tersebut menyerukan agar Gibran mempertimbangkan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Denny Indrayana, misalnya, menyatakan bahwa apabila persoalan syarat pendidikan tersebut secara hukum dinilai bermasalah, maka secara etika Gibran semestinya mempertimbangkan pengunduran diri. Bahkan dari lingkungan PDI Perjuangan muncul pernyataan agar Gibran mundur.

Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan sejak awal yaitu Gibran belum mengundurkan diri. Informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana pengunduran dirinya pada 9 Oktober

2026 telah dibantah oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai hoaks.

Yang menarik bukan semata-mata apakah Gibran akan turun atau bertahan. Persoalan yang lebih besar adalah apa yang terjadi terhadap kehidupan sosial-Politik Indonesia apabila tekanan tersebut terus membesar?

Dari persoalan personal menjadi persoalan legitimasi.

Putusan MK menghadirkan situasi yang tidak sederhana. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyederajatan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden karena perkara tersebut berada dalam konteks sengketa hasil Pilpres 2024 dan Gibran sudah dilantik.

Di sinilah muncul ruang politik yang sangat sensitif.

Secara hukum, jabatan Wakil Presiden tidak otomatis gugur hanya karena muncul desakan publik. Tetapi secara politik, temuan dan pertimbangan MK tersebut dapat menjadi sumber krisis legitimasi persepsional.

Legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui keputusan formal lembaga negara. Ia juga dibentuk oleh persepsi publik mengenai kepatuhan terhadap hukum, transparansi, etika, dan kewajiban proses memperoleh kekuasaan.

Ketika sebagian masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi tersebut, persoalannya tidak lagi berhenti pada dokumen pendidikan. Ia dapat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa kuat sistem politik Indonesia menjamin kesetaraan aturan bagi seluruh warga negara?

Bahaya jika tekanan berubah menjadi delegitimasi.

Desakan agar Gibran mundur merupakan bagian dari kebebasan politik. Kritik terhadap pejabat publik adalah elemen normal

dalam demokrasi. Masalah muncul ketika tekanan tersebut berubah menjadi upaya delegitimasi terhadap seluruh institusi negara.

Jika narasi yang berkembang adalah bahwa proses politik 2024 sejak awal bermasalah, maka sasaran kritik tidak lagi hanya Gibran. KPU, partai politik, DPR, pemerintah, bahkan institusi peradilan dapat ikut terseret.

Padahal, demokrasi membutuhkan kepercayaan terhadap prosedur. Ketika masyarakat mulai menganggap bahwa seluruh prosedur politik selalu dapat direayasa oleh kepentingan tertentu, maka konsekuensinya jauh lebih serius daripada pergantian seorang pejabat.

Yang terancam adalah trust terhadap institusi.

Dalam konteks itu, polemik Gibran berpotensi menjadi simbol dari perdebatan yang lebih besar mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dinasti politik, dan kualitas demokrasi Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SPORT

Persiraja Bungkam PSIS Semarang 3-1, Raih Kemenangan Perdana di Championship 2026

Oleh Redaksi · 9 Okt, 21.51 WIB



Hasil tersebut menjadi kejutan bagi PSIS yang sebelumnya mengoleksi sembilan poin. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu justru kesulitan membendung serangan Persiraja yang mampu memaksimalkan peluang menjadi gol.

Persiraja membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan delapan menit. Risky Safri sukses menuntaskan umpan Martin Chaves untuk membawa tim tamu memimpin 1-0.

PSIS berupaya mengembangkan permainan untuk mengejar keteringgalan. Namun, upaya tuan rumah belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Persiraja kembali mencetak gol pada menit ke-39 melalui Martin Chaves yang memaksimalkan peluang untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Situasi PSIS semakin sulit menjelang turun minum. Ahmad Nufi-andani harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu merah pada menit 45+2 akibat pelanggaran keras.

Keunggulan dua gol Persiraja bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski mencatatkan penguasaan bola sebesar 61 persen, PSIS belum mampu mengimbangi efektivitas serangan tim tamu.

Memasuki babak kedua, Persiraja langsung menambah keunggulan. Pada menit ke-51, Rangga Bolang mencetak gol ketiga yang membuat tim asuhan M. Ridwan unggul 3-0.

Tertinggal tiga gol dan bermain dengan 10 pemain, PSIS mencoba memperbaiki situasi melalui pergantian pemain. Pelatih Widodo Cahyono Putro memasukkan Hari Nur Yulianto pada menit ke-68 untuk menggantikan Deri Corfe.

Pergantian tersebut memberikan tambahan daya gedor bagi tuan rumah. PSIS akhirnya memperkecil keteringgalan menjadi 1-3 melalui gol Hari Nur Yulianto pada menit ke-88.

Namun, gol tersebut tidak cukup untuk mengubah hasil pertandingan. Persiraja mampu mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang.

Persiraja Akhiri Paceklik Kemenangan

Tambahan tiga poin menjadi modal penting bagi Persiraja untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup A Championship 2026. Kemenangan atas PSIS sekaligus mengakhiri penantian Laskar Rencong setelah melewati empat pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan.

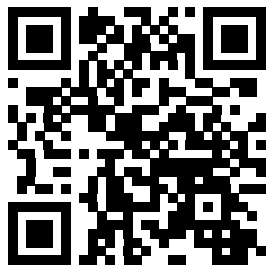
Sementara itu, kekalahan di kandang membuat PSIS gagal menambah koleksi poinnya. Tim asal Semarang tersebut tetap mengantongi sembilan poin dan berada di peringkat kedua klasemen sementara.

Hasil di Stadion Jatidiri menjadi momentum kebangkitan bagi Persiraja. Efektivitas dalam memanfaatkan peluang dan kemampuan menjaga keunggulan menjadi faktor penting di balik kemenangan tandang tersebut.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Meriahkan SYAFIF 2026, Bank Aceh Syariah Bagi-Bagi Souvenir hingga Voucher QRIS Rp20 Ribu

Oleh Redaksi · 9 Okt, 13.00 WIB



Program Pembukaan Rekening - Isi Formulir Free Souvenir di even Syariah Financial Fair (SYAFIF). FLYER/BAS untuk HAI.

BANDA ACEH - Gelaran Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2026 yang berpusat di Pelataran Masjid Raya Baiturrahman pada 9–11 Oktober 2026 tidak hanya menjadi etalase ekonomi syariah, tetapi juga pusat literasi digital bagi masyarakat Aceh.

Di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang memadati kawasan ikonik tersebut, Bank Aceh Syariah hadir dengan strategi jempit bola yang memikat perhatian.

Mengusung kampanye “Buka Rekening, Bawa Pulang Souvenir”, bank pelat merah daerah ini sukses menyedot antusiasme warga untuk beralih ke ekosistem perbankan digital.

Salam hangat langsung digaungkan oleh jajaran Bank Aceh kepada para pengunjung yang menyempatkan mampir ke booth resmi.

Dalam momentum bersejarah di halaman Masjid Raya Baiturrahman ini, Bank Aceh menawarkan pengalaman membuka rekening yang jauh dari kata ribet, sekaligus

memberikan apresiasi langsung berupa souvenir eksklusif bagi setiap nasabah baru yang berhasil mendaftar di lokasi acara.

Namun, kejutan istimewa tidak berhenti di situ. Bank Aceh Syariah menyiapkan program Fast and Furious yang memicu adrenalin para pemburu promo.

Khusus bagi 100 nasabah pertama yang berhasil membuka rekening dan sekaligus mengaktifkan aplikasi Action Mobile, bank ini menyiapkan voucher transaksi QRIS senilai Rp20.000.

Langkah ini dinilai sangat strategis, tidak hanya sebagai bentuk reward instan, melainkan sebagai katalisator untuk membiasakan masyarakat Aceh bertransaksi non-tunai (cashless) di berbagai merchant yang telah bekerja sama dengan QRIS Bank Aceh.

Akselerasi Inklusi Keuangan di Pusat Peradaban

Pemilihan Pelataran Masjid Raya Baiturrahman sebagai venue utama SYAFIF Goes to Aceh

memiliki makna filosofis dan ekonomis yang dalam.

Lokasi yang menjadi simbol kebanggaan dan pusat ibadah umat Islam ini bertransformasi selama tiga hari menjadi pusat pergerakan ekonomi umat.

Kehadiran Bank Aceh di sini menegaskan komitmen nyata institusi dalam mendukung visi Aceh sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah internasional, sekaligus memastikan bahwa layanan keuangan yang modern, cepat, dan aman dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Aplikasi Action Mobile yang diwajibkan untuk aktivasi voucher QRIS merupakan bukti keseriusan Bank Aceh dalam mendampingi nasabah.

Melalui super-app ini, nasabah tidak hanya mudah mengklaim promo, tetapi juga dapat mengelola keuangan, berinvestasi, hingga bertransaksi syariah kapan saja dan di mana saja, selaras dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba terhubung.

Pantau Terus Informasi Lengkapnya

Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi transaksi makin seru dan tidak ingin melewatkan batas 100 nasabah pertama, segera kunjungi booth Bank Aceh Syariah di area SYAFIF.

Untuk memastikan kelancaran dan memahami batasan program, nasabah diimbau untuk menyimak rincian Syarat dan Ketentuan (S&K) yang telah dipublikasikan.

Informasi lengkap mengenai mekanisme klaim voucher dan souvenir dapat diakses langsung melalui petugas frontliner di lokasi atau melalui slide informasi digital yang dipampang di kanal media sosial resmi Bank Aceh.

Tutup rangkaian SYAFIF 2026 Anda dengan langkah finansial yang cerdas.

Mari jadikan momentum ini sebagai awal perjalanan finansial yang lebih berkah, modern, dan terkoneksi bersama Bank Aceh Syariah.

Install Aplikasi Action Mobile:

ACEH

1.820 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Mudzakah Internasional Ulama Tauhid Sufi

Oleh Redaksi · 9 Okt, 17.45 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Sebanyak 1.820 personel gabungan TNI-Polri dan unsur pemerintah daerah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Mudzakah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 pada 9–11 Oktober 2026. Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan di Aula Meuligoe Polda Aceh, Jumat, 9 Oktober 2026.

Apel dipimpin Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho dan diikuti personel dari berbagai instansi yang terlibat dalam pengamanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh rangkaian agenda internasional tersebut berlangsung aman, tertib, dan khidmat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, apel kesiapan menjadi momentum untuk memastikan setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi selama kegiatan berlangsung.

“Pengamanan kegiatan berskala internasional ini membutuhkan kesiapan, kedisiplinan, dan sinergi seluruh personel. Kami ingin memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib, sehingga para ulama, peserta dari berbagai daerah dan negara, serta masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman,” ujar Joko.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga oleh kualiti

tas pelayanan petugas di lapangan. Karena itu, seluruh personel diharapkan menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan responsif, dengan tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

Koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian, terutama dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan, mengatur kelancaran arus lalu lintas, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi tetap kondusif.

“Seluruh personel diharapkan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, mengedepankan pendekatan humanis, serta tetap waspada dan responsif terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan,” tambah bahnnya.

Polda Aceh bersama TNI dan unsur pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pengamanan terpadu selama Mudzakah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 berlangsung.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para ulama, peserta, tamu undangan, dan masyarakat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan khidmat.

“Dengan kesiapan dan kerja sama seluruh unsur, kami berharap agenda internasional ini dapat berlangsung dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak yang terlibat,” pungkas Joko.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Oleh Redaksi · 9 Okt, 08.58 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Mantan wartawan))

I antara sekitar partai besar, hanya PDIP berani secara vulgar menyerang Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yang lain masih kicep. Wajar sih, karena banteng di luar pemerintahan. Gerakan turunkan foto Gibran justru dimotori oleh PDIP.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, dengan tenang menurunkan foto Wapres Gibran dari dinding ruang kerjanya. Alasannya sederhana, "Saya malu." Malu punya Wapres belum bisa menunjukkan bukti ijazah setara SMA.

Foto Presiden Prabowo tetap terpasang manis. Foto Gibran ditiptkan ke sekretariat, "sementara" saja. Nanti kalau ada fakta hukum lebih meyakinkan, bisa dipasang lagi. Mirip sewa kos-kosan.

Aksi ini viral. Rojab tegaskan ini sikap pribadi, bukan instruksi partai. DPP PDIP langsung bilang "kami tidak pernah menyuruh", tapi juga tidak sebut mau kasih sanksi. Silakan saja, asalkan jangan bilang atas nama partai.

Belum selesai. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira sempat menyarankan Gibran lebih baik mundur. "Lebih terhormat," katanya. Ada juga bilang Gibran bisa sambil jadi Wapres sambil ambil Paket C. Nuan bayangkan: pagi sidang kabinet, sore les Paket C. Multitasking level dewa.

Lalu muncul Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR. Dia lebih "maju". Menurutny, fakta paling penting dari putusan MK adalah Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat jadi calon wakil presiden.

Dokumen administrasi diajukan ke KPU patut diduga cacat hukum. Karena sudah terpilih tapi

melanggar syarat UU, maka "patut diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan/atau perbuatan tercela" sebagaimana Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Puncaknya? Deddy bilang DPR sangat mungkin menindaklanjuti lewat Pansus atau Hak Angket. Dari turunkan foto di ruang kerja, sekarang naik kelas jadi "bisa dibahas di Senayan".

Yang paling absurd? Gibran itu dulu anak emas PDIP. Tahun 2019 dia daftar jadi kader. Tahun 2020 PDIP resmi mengusungnya jadi calon Walikota Solo. Dia menang telak dan dilantik. Semua di bawah bendera banteng.

Sekarang, setelah "pindah kamar" jadi Wapres bareng Prabowo, fotonya diturunkan, disuruh mundur, dan dibuka opsi pansus serta hak angket.

Seperti mantan dulu bilang "kamu yang terbaik", sekarang bilang "mending kamu pulang aja, biar kami proses lebih lanjut".

MK sendiri menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena permohonan tak punya legal standing. Tapi di pertimbangan, hakim tegas bilang tidak menemukan bukti meyakinkan, Gibran punya ijazah/sertifikat/diploma setara SMA.

Yang ada cuma certificate of attendance dan academic records. Ini dokumen lebih mirip bukti kehadiran, bukan kelulusan. Istana bilang "bukan tidak ada, tapi belum ditemukan". Bahasa yang sangat kreatif.

Secara hukum Gibran tetap Wapres. Secara moral dan Politik, beberapa kader PDIP sudah mulai menurunkan foto, menyarankan mundur, dan membuka opsi pansus.

Politik penuh ironi. Yang dulu mengusung, sekarang menurunkan foto. Yang dulu mendukung, sekarang menyarankan mundur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.com

HIBURAN

Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Resmi Dicabut, Kini Dijebloskan ke Lapas Tangerang

Oleh Redaksi · 9 Okt, 10.47 WIB



BANDA ACEH - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) resmi mencabut status pembebasan bersyarat (PB) Indra Kesuma alias Indra Kenz. Setelah keputusan tersebut, terpidana kasus investasi ilegal itu kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, mengatakan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut telah ditindaklanjuti dengan menjemput Indra Kenz dari lokasi pelaksanaan PB.

Selanjutnya, Indra Kenz dibawa ke Lapas Kelas I Tangerang untuk kembali menjalani masa pidananya. Menurut Ishadi, proses pemindahan berlangsung dengan lancar karena yang bersangkutan bersikap kooperatif.

"Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya. Yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 WIB berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 WIB barusan sudah masuk di Lapas Kelas I Tangerang," kata Ishadi kepada wartawan, Jumat (9/10).

Pencabutan pembebasan bersyarat itu menindaklanjuti temuan Kementerian Imipis soal fasilitas bawah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Indra Kenz diduga menikmati hunian mewah di Lapas Cibinong.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipis Rudi Setiawan sebelumnya menjelaskan, tiga kontainer yang ditemukan di Lapas Cibinong tercatat sebagai barang milik negara. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah barang yang berada di dalamnya diduga digunakan atau dimiliki oleh warga binaan.

"Ada kontainer, ada tiga kontainer. Kontainer ini semua tercatat,

tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan," ucap Rudi di Jakarta, Senin (5/10).

Dari hasil penelusuran tersebut, nama Indra Kenz turut muncul. Rudi menyebut pihaknya menemukan keterkaitan Indra Kesuma dengan fasilitas yang berada di dalam lingkungan lapas.

"Sebagaimana sudah ketemu di sana dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma, Indra Kenz," ujar Rudi.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imipis dengan merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS).

"Dan ya sudah kami rekomendasikan kepada Dirjen PAS untuk ditarik kembali," jelas Rudi.

Sebagaimana diketahui, Indra Kenz sempat mendapatkan pembebasan bersyarat dan dapat meninggalkan Lapas Cibinong pada Kamis (24/9). Ia merupakan terpidana dalam perkara penipuan investasi melalui platform binary option Binomo.

Berdasarkan ketentuan pembebasan bersyarat yang sebelumnya berlaku, Indra seharusnya menjalani masa bimbingan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Bogor hingga 2030. Selama masa tersebut, ia wajib mematuhi ketentuan yang melekat pada status pembebasan bersyarat dan tidak melakukan tindak pidana.

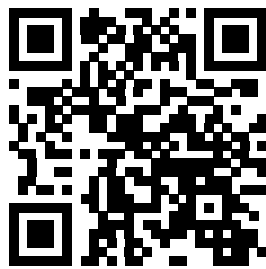
Pelanggaran terhadap ketentuan PB, termasuk kembali terlibat dalam perkara pidana, dapat menjadi dasar pencabutan status tersebut.

Dalam kondisi itu, seorang terpidana dapat kembali menjalani pidana di lembaga pemasarakatan untuk menyelesaikan sisa hukumannya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Houthi Serang Arab Saudi: Pesawat Saudia Terbakar di Bandara Riyadh

Oleh Redaksi · 9 Okt, 09.59 WIB



BANDA ACEH -Eskalasi perang Yaman mulai mengancam aktivitas penerbangan dan fasilitas vital Arab Saudi.

Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran tidak hanya menewaskan tiga orang dalam sepekan terakhir, tetapi juga menyebabkan sebuah pesawat milik maskapai nasional Saudia Airlines terbakar saat terparkir di Bandara Riyadh, Kamis, 8 Oktober 2026, waktu setempat.

Menurut tiga sumber yang mengetahui insiden tersebut, pesawat mengalami kerusakan parah setelah terkena serpihan serangan atau proyektil lain. Belum diketahui secara pasti apakah ada korban luka. Namun, pesawat itu diyakini tidak membawa penumpang saat kejadian. Rekaman yang diverifikasi Reuters memperlihatkan asap hitam tebal dan kobaran api mem-bubung dari area bandara.

Houthi mengklaim telah menyerang Bandara Riyadh dan memperingatkan para pekerja agar menjauhi fasilitas energi yang mereka sebut sebagai target berikutnya. Secara terpisah, pejabat Arab Saudi menyatakan serpihan rudal yang berhasil dicegat menghantam sebuah taman kanak-kanak dan kompleks medis di Riyadh.

Serangan tersebut turut mengganggu penerbangan. Maskapai Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan menuju Riyadh. Data perusahaan analisis penerbangan Cirium menunjukkan hampir separuh jadwal keberangkatan dari Bandara Riyadh telah dibatalkan pada Kamis, waktu setempat. Sebanyak 31 pembatalan tambahan diperkirakan terjadi di seluruh bandara Arab Saudi pada Jumat.

Pemerintah Arab Saudi menyerobot serangan Houthi berkaitan dengan dukungan kerajaan terha-

dap pasukan pemerintah Yaman yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasukan yang didukung Riyadh pekan ini meluncurkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi, termasuk kawasan strategis di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Konflik yang kembali memanasi setelah gencatan senjata pada 2022 itu juga memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Sekitar 200.000 orang dilaporkan mengungsi sejak pertempuran kembali berkobar. Di sisi lain, Houthi terus memperluas pengaruhnya dan mengepung Taiz, kota terbesar ketiga di Yaman, dengan menguasai wilayah di sepanjang jalur pegunungan menuju Aden.

Arab Saudi kini meminta dukungan negara-negara sekutu untuk menghadapi serangan tersebut.

Turki, anggota NATO, menyatakan akan memberikan bantuan yang terutama bersifat defensif dan teknis, termasuk peralatan militer, berbagi intelijen, serta sistem persenjataan.

Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat dan seorang pejabat pertahanan Suriah mengatakan Damaskus tengah mempertimbangkan opsi bantuan militer, mulai dari dukungan pertahanan hingga pengerahan pasukan untuk membantu operasi melawan Houthi.

Perluasan konflik ini menambah ketegangan di Timur Tengah, yang sebelumnya telah dilanda perang AS-Iran. Ancaman terhadap bandara, fasilitas energi, dan jalur pelayaran strategis meningkatkan risiko gangguan keamanan serta aktivitas ekonomi di kawasan tersebut

SPORT

Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi Siap Digelar, Antusias Pelajar dan Masyarakat Terus Menguat

Oleh Redaksi · 9 Okt, 11.00 WIB



Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi. FOTO/Dok. Istimewa.

BANDA ACEH – Persiapan pelaksanaan Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi terus dimatangkan panitia. Sejumlah persiapan teknis dilakukan untuk memastikan kejuaraan olahraga panco tersebut dapat berlangsung dengan tertib, sportif, dan meriah.

Antusiasme masyarakat Aceh terhadap event ini terbilang tinggi. Peserta yang akan ambil bagian tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga kalangan pelajar.

Panitia menilai tingginya minat peserta menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga panco di Aceh. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang silaturahmi sekaligus mendorong generasi muda untuk menjalani pola hidup sehat melalui olahraga.

Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi juga membawa pesan khusus melalui nama "Ghozi". Panitia mengangkat kisah Nabi Sam'un Ghozi AS sebagai bagian dari pesan moral kegiatan, khususnya tentang kekuatan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Pesan yang ingin disampaikan sederhana, bahwa kekuatan fisik hendaknya tidak membuat seseorang melupakan nilai-nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

"Sehebat dan sekuat apa pun seseorang, tetap harus taat kepada Allah SWT. Itu yang menjadi salah satu pesan dan iktibar yang ingin kami sampaikan melalui

Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi," ujar panitia.

Untuk memastikan kesiapan pertandingan, technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026, bertempat di Pas Kopi, Lhong Raya, setelah Salat Ashar.

Sementara itu, pembukaan Event Panco Aceh Teuga dijadwalkan akan dibuka oleh Ketua KONI Kota Banda Aceh.

Sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan olahraga juga direncanakan hadir, di antaranya Ketua Umum PABSI Aceh, Ketua KORMI Aceh, Kapolsek Baiturrahman, serta para sponsor yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan.

Panitia mengajak masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya untuk hadir serta memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga panco di Aceh.

"Semoga Event Panco Aceh Teuga Seri Ghozi dapat berjalan dengan baik, lancar dan sportif. Kami berharap kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melahirkan masyarakat Aceh yang sehat, kuat tubuhnya dan kuat pula imannya," demikian harapan panitia.

Event ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan olahraga panco secara lebih luas sekaligus membuka ruang bagi pelajar dan generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan melalui olahraga.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

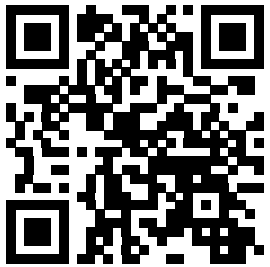
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SYARIAH

Kupas Tuntas Ekosistem Keuangan Syariah, Jaringan PRIMA dan Bank Aceh Syariah Gelar PRIMATalk Show di Masjid Baiturrahman

Oleh Redaksi · 9 Okt, 12.00 WIB



Jaringan PRIMA bersama Bank Aceh Syariah bakal menghadirkan PRIMATalk Show sebagai salah satu rangkaian acara bergengsi dalam gelaran Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2026. FLYER/BAS untuk HAL.

BANDA ACEH - Akhir pekan ini, kawasan ikonik Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat literasi dan edukasi ekonomi umat.

Jaringan PRIMA bersama Bank Aceh Syariah bakal menghadirkan PRIMATalk Show sebagai salah satu rangkaian acara bergengsi dalam gelaran Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2026.

Acara ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam bagi masyarakat, atau yang akrab disapa Kawan PRIMA, mengenai dinamika dan masa depan layanan keuangan syariah di Tanah Rencong.

Dalam talkshow yang dijadwalkan berlangsung meriah ini, para

narasumber dari Jaringan PRIMA dan Bank Aceh Syariah akan mengupas tuntas berbagai isu strategis yang sedang menjadi tren.

Diskusi akan mencakup perkembangan terkini layanan keuangan syariah, peran vital Bank Aceh Syariah dalam memberdayakan dan memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat Aceh, hingga pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada upaya membangun ekosistem transaksi yang semakin terhubung, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip muamalah yang syar'i.

Pemilihan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lokasi penyeleng-

garan bukanlah tanpa alasan. Tempat bersejarah ini merepresentasikan integrasi yang harmonis antara nilai-nilai spiritual dan aktivitas ekonomi umat.

Melalui PRIMATalk Show, Jaringan PRIMA dan Bank Aceh Syariah berharap dapat menjembatani kesenjangan informasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mengedukasi Kawan PRIMA tentang bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, modern, dan berkelanjutan.

Bagi Kawan PRIMA dan masyarakat umum yang ingin mendapatkan insight berharga seputar transformasi digital dan layanan syariah, acara ini menjadi momentum

yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Bagi yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi, seluruh rangkaian diskusi inspiratif dari para pakar dan praktisi akan didokumentasikan dengan baik.

Nantikan siaran lengkap, cuplikan momen seru, serta informasi terkini seputar SYAFIF 2026 dan PRIMATalk Show bersama Bank Aceh Syariah hanya di kanal media sosial resmi Jaringan PRIMA.

Mari bersama-sama wujudkan ekosistem keuangan syariah yang lebih maju, cerdas, dan terhubung.

Install Aplikasi Action Mobile:

EKONOMI

Dongkrak Omzet Merchant di SYAFIF Goes to Aceh, Bank Aceh Siapkan Reward Rp6 Juta Lewat Transaksi QRIS

Oleh Redaksi · 9 Okt, 09.30 WIB



Omzet Melesat, Peluang Menang didapat! Gunakan Terus QRIS Bank Aceh di Aplikasi Action Mobile pada even Syariah Financial Fair (Syafif). FLYER/BAS untuk HAL.

BANDA ACEH - Gelaran Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Aceh tidak hanya menjadi pesta literasi dan inklusi keuangan syariah, tetapi juga momentum emas bagi para pelaku usaha untuk mendorong omzet penjualan.

Menyambut antusiasme tersebut, Bank Aceh hadir dengan program spesial yang menyasar para merchant atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi.

Melalui program ini, Bank Aceh menawarkan total hadiah senilai Rp6.000.000 bagi merchant teraktif yang berhasil memaksimalkan layanan QRIS Bank Aceh selama acara berlangsung.

Mengusung semangat "Omzet Melesat, Peluang Menang di Dapat", inisiatif ini dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulan bagi para pelaku usaha yang telah bertransformasi ke dalam ekosistem pembayaran digital.

Bank Aceh mengajak seluruh merchant di ajang SYAFIF Goes to Aceh untuk aktif menerima transaksi non-tunai.

Semakin tinggi frekuensi dan volume transaksi QRIS yang berhasil dihimpun oleh sebuah merchant, semakin besar pula peluang mereka untuk dinobatkan sebagai merchant terbaik dan membawa pulang reward menarik yang telah disiapkan.

Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan

Bank Aceh dalam mempercepat adopsi ekonomi dan keuangan syariah digital di wilayah Aceh.

Penerimaan pembayaran melalui QRIS tidak hanya memudahkan pengunjung SYAFIF untuk berbelanja dengan cepat, aman, dan praktis tanpa uang tunai, tetapi juga membantu para merchant dalam mencatat arus kas secara lebih rapi, akurat, dan transparan.

Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan bisnis para pelaku usaha lokal agar semakin kompetitif dan go digital.

Guna memastikan partisipasi yang optimal, Bank Aceh telah menyiapkan mekanisme yang transparan dan mudah diakses.

Para merchant dapat menyimak rincian Syarat dan Ketentuan (S&K) program, termasuk periode penilaian dan tata cara klaim hadiah, melalui kanal informasi resmi maupun langsung di booth Bank Aceh yang hadir di lokasi acara.

Melalui gelaran yang penuh inspirasi ini, Bank Aceh kembali mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk turut serta meramaikan SYAFIF Goes to Aceh.

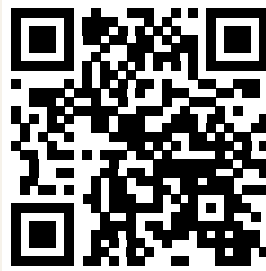
Mari jadikan setiap transaksi lebih berarti, biarkan omzet terus melesat, dan ciptakan pengalaman berjualan maupun berbelanja yang kian seru bersama Bank Aceh.

Install Aplikasi Action Mobile:

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

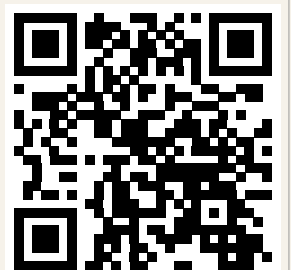
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia